

**PERAN KOMITE SEKOLAH
DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI SMP NEGERI 03 KOTA BATU**

SKRIPSI

Oleh

AHMAD SYAIFUDDIN
05110149



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2012**

**PERAN KOMITE SEKOLAH
DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI SMP NEGERI 03 KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam

Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

Diajukan oleh

Ahmad Syaifuddin

05110149



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2012**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN KOMITE SEKOLAH
DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI SMP NEGERI 03 KOTA BATU**

SKRIPSI

Oleh

AHMAD SYAIFUDDIN

05110149

Telah Disetujui Pada Tanggal 10 Maret 2012

Oleh Dosen Pembimbing

Dr. H. Farid Hasyim M. Ag

NIP. 195203091983031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I

NIP. 196512051994031003

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 03 KOTA BATU SKRIPSI

Di persiapkan dan di susun oleh

Ahmad Syaifuddin (05110149)

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal
23 Juli 2012

Dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar strata satu sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

Pada tanggal: 23 Juli 2012

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. A. Zuhdi, M.A ()
NIP.

Sekretaris Sidang

Dr. H. Farid Hasyim, M. Ag ()
NIP. 195203091983031002

Pembimbing

Dr. H. Farid Hasyim, M. Ag ()
NIP. 195203091983031002

Penguji Utama

Prof. Dr. H.M. Djunaidy Ghony ()
NIP. 194407121964101001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. M. Zainuddin, MA
NIP. 196205071995031001

Dr. H. Farid Hasyim, M. Ag
Dosen Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : **Ahmad Syaifuddin** Malang, 10 Maret 2012

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di

Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Syaifuddin

NIM : 05110149

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul Sripsi : *Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Di SMP Negeri 03 Kota Batu.*

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dr. H. Farid Hasyim, M. Ag

NIP. 195203091983031002

MOTTO

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ.....

Artinya: "*.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....*" (Al-Maidah Ayat 2)

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya semata, penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Di SMP Negeri 03 Kota Batu”** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam, selalu tercurahkan sepenuhnya kepada junjungan Nabi Besar Muhammad, SAW. Yang telah merubah zaman ini, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi ini.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengatualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga amal baik tersebut dibalas oleh Allah SWT. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta segenap keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi untuk menyelesaikan studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. M. Zainuddin, MA , selaku Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Drs.H. M. Padil, M.Pd. I, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. H. Farid Hasyim, M. Ag, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya sampai skripsi ini selesai.
6. Bapak Drs. H. Sudjud Lamudjianto, M. Pd, selaku kepala Sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu.
7. Bapak Drs. Didik Subagio, M. Si selaku Ketua Komite sekolah di SMP Negeri 03 Kota Batu.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a, motivasi, bantuan serta perhatian yang tulus ikhlas. Semoga Allah SWT membalas amal dan perbuatan mereka amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Karena penulis bukan mahluk sempurna dan tidak akan luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, saran dan kritik yang baik dan membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta memberikan setitik khazanah pengetahuan untuk terus memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita. Amin

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Malang, 18 Juni 2009



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS TARBIYAH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

1. Nama : Ahmad Syaifuddin
2. NIM / Jurusan : 05110149/Pendidikan Agama Islam
3. Pembimbing : Farid Hasyim, MPd
4. Judul : **Peranan Komite Sekolah dalam Menunjang Penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu**

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	1 Maret 2009	Proposal dan BAB I	
2	5 Maret 2009	Revisi BAB I	
3	8 Maret 2009	BAB II dan BAB III	
4	21 Maret 2009	Revisi BAB II dan BAB III	
5	18 Mei 2011	BAB IV dan BAB V	
6	18 Juni 2011	Keseluruhan BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V dan BAB VI	
7	10 Maret 2012	ACC Keseluruhan	

Malang, 10 Maret 2012

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. H. Farid Hasyim M. Ag
NIP. 195203091983031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN NOTA DINAS	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Sitematika Pembahasan	13
H. Penegasan Istilah	14

BAB II TINJAUAN TEORI	16
A. Peranan Komite Sekolah	16
1. Pengertian Komite Sekolah	16
2. Kedudukan dan sifat Komite Sekolah	18
3. Tujuan Komite Sekolah	20
4. Fungsi dan Tugas Komite Sekolah	22
5. Pembentukan Komite Sekolah	25
6. Landasan Terbentuknya Komite Sekolah	27
7. Struktur organisasi Komite Sekolah	30
8. Peran Komite Sekolah	34
B. Penyelenggaraan Pendidikan	38
1. Pengertian Pendidikan	38
2. Dasar Pendidikan	40
3. Tujuan pendidikan.....	41
4. Kualitas pendidikan	43
5. Tinjauan Tentang Pendidikan.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Pendekatan dan jenis Penelitian	66
B. Kehadiran Peneliti	69
C. Lokasi Penelitian	69
D. Data dan Sumber data	70
E. Metode pengumpulan data	71
F. Analisis data	74

G. Pengecekan Keabsahan Data	75
H. Tahapan Penelitian	76
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	78
A. Latar Belakang Obyek Penelitian	78
1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 03 Kota Batu	78
2. Visi dan Misi SMP Negeri 203 Kota Batu	79
3. Tujuan SMP Negeri 03 Kota Batu	79
4. Kondisi SMP Negeri 03 Kota Batu	81
5. Letak Geografis SMP negeri 03 Kota Batu	83
6. Denah Lokasi SMP Negeri 03 Kota Batu	83
7. Stuktur Organisasi SMP Negeri 03 Kota Batu	83
8. Keadaan Guru dan Siswa SMP Negeri 03 Kota Batu	83
9. Sarana dan prasarana SMP Negeri 03 Kota Batu	87
B. Keadaan Komite Sekolah	88
1. Komite Sekolah	88
2. Fungsi dan Tujuan Komite Sekolah	90
3. Struktur Organisasi Komite Sekolah	94
4. Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu	81
5. Bentuk Kerjasama antara Komite Sekolah dengan Guru Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu	103

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	106
A. Peranan komite sekolah dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu	106
B. Bentuk Kerja sama antara komite sekolah dengan guru dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu	112
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran-saran	116
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS TARBIYAH**

Il. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax (0341) 572533

Nomor : Un. 3.1/TL.00/157/2010

Malang, 10 Maret 2010

Lampiran : -

Perihal : Penelitian

Kepada
Yth. Kepala SMP Negeri 03
di-
Batu

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mengharap dengan hormat agar mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ahmad Syaifuddin
NIM : 05110149
Semester/Th. Ak. : Genap/2010-2011
Judul Skripsi : *Peranan Komite sekolah Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Kota Batu.*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/menyusun skripsinya, yang bersangkutan mohon diberikan izin/kesempatan untuk mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP. 196205071995031001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BATU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BATU
(STATE JUNIOR HIGH SCHOOL)

Jl. Raya Beji No 8 Telp. (0341) 592084 Kec. Junrejo Kota Batu 65326

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala sekolah smp negeri 03 kota batu, menerangkan:

Nama : Ahmad Syaifuddin
NIM : 05110149
Semester/Th. Ak : XI/ 2011
Fakultas : Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Memang benar nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian di SMP negeri 03 Kota Batu dari tanggal .10 mei 2011 sampai dengan 25 mei 2011, untuk keperluan penyusunan skripsi yang berjudul:

“PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN BELAJAR
MENGAJAR GURU DI SMP NEGERI 03 KOTA BATU”

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu,30 Mei 2011

Kepala Sekolah,

Drs. H. Sudjud Lamudjianto, M.Pd

NIP. 19540801 198303 1 013

ABSTRAK

Syaifuddin, Ahmad. 2009. *Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Di SMP Negeri 03 Kota Batu*. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang:Dr. H. Farid Hasyim M.pd

Kata Kunci : Peran, Komite Sekolah, Penyelenggaraan Pendidikan

Komite Sekolah Merupakan sebuah lembaga mandiri atas prakarsa masyarakat yang peduli akan pendidikan. Secara singkat tujuan adanya komite sekolah adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan operasional dan membantu sekolah dalam kelancaran pendidikan (*Advisor Agency*); komite sekolah sebagai pendukung (*Supporting Agency*); peran komite sekolah selanjutnya sebagai pengontrol (*Controlling Agency*); berperan sebagai mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat dilingkungan sekolah dengan upaya untuk merealisasikan pelaksanaan Peningkatan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas

Dari penelitian diatas peneliti melakukan penelitian mengenai Peranan Komite Sekolah Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Di SMP Negeri 03 Kota Batu, permasalahan itu meliputi; 1). Bagaimana Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Di SMP Negeri 03 Kota Batu? 2). Bagaimana Bentuk kerjasama antara Komite Sekolah dengan Guru dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Di SMP Negeri 03 Kota Batu?

Desain penelitian yang digunakan di SMP Negeri 03 Kota Batu adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, interview, serta dokumentasi. Analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni berupa data-data yang tertulis atau wawancara secara lisan dari orang yang terlibat dalam penelitian ini (informan) serta perilaku yang di amati. Sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat menggambarkan secara keseluruhan.

Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: peran komite sekolah secara umum adalah sebagai pemberi pertimbangan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan supaya masukan tersebut dapat membantu masyarakat sekolah dan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang ada di SMP Negeri 03 Kota Batu. Dan bentuk kerjasama antara komite sekolah dengan guru adalah dengan dilibatkannya komite sekolah secara langsung di dalam penentuan program-program pendidikan sekolah serta bersama-sama komite sekolah dan guru serta pihak sekolah menyusun RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan UU RI tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 memuat Tujuan Pendidikan Nasional sebagai berikut “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam *kompetensi lintas kurikulum*, yaitu pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak yang mencakup kecakapan belajar sepanjang hayat dan keterampilan hidup yang seharusnya dimiliki. Hasil belajar dari kompetensi lintas kurikulum ini perlu dicapai melalui pembelajaran-pembelajaran dari semua rumpun pelajaran.

Revolusi informasi telah mengakibatkan dunia menjadi semakin terbuka, menghilangkan batas-batas geografis, administrasi-yuridis, politis, dan sosial-budaya. Masyarakat global, masyarakat teknologis, ataupun masyarakat informasi yang bersifat terbuka, berubah sangat cepat dalam memberikan tuntutan, tantangan, bahkan ancaman-ancaman baru. Pada abad sekarang ini manusia-manusia dituntut masyarakat tahu banyak (*"knowing much*), berbuat

banyak ("*doing much*"), mencapai keunggulan ("*being excellence*") menjadi hubungan dan kerjasama dengan orang lain ("*being sociable*"), serta berusaha memegang teguh nilai-nilai moral ("*being morally*"). Manusia inilah yang menjadi tuntutan masyarakat global.¹

Sedangkan kehidupan global merupakan kehidupan yang penuh dengan tantangan sekaligus membuka peluang-peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi untuk memperoleh kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Kehidupan global amat merasuk di semua sendi kehidupan, kehidupan global menjanjikan peluang-peluang manis laju perkembangan teknologi tingkat tinggi yang serba cepat dan instan, namun juga menghadapi tantangan-tantangan yang tidak sedikit seiring perkembangan zaman. Sendi pendidikan termasuk yang cukup sensitif menghadapi era globalisasi ini.

Di sinilah tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan mutu pendidikan untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas bagi kebutuhan domestik maupun global, maka pendidikan di Indonesia harus peka pada peluang yang muncul sekaligus juga peka terhadap tantangan yang menghadang.²

Dari pernyataan di atas jelas bawasanya salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan dan ini terletak pada proses pembelajarannya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam dunia

¹ Nana Saodih Sukmadinata, *pengendalian mutun pendidikan sekolah menengah*, (Bandung: PT Refika Aditama)Hlm. 5-6

² Sam M. Can dan Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 113-114

pendidikan , khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran yang efektif sehingga mutu pendidikan semakin meningkat, pendidikan nasional misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal; peningkatan kompetensi guru; pengadaan alat dan buku pembelajaran; mengadakan perbaikan sarana pendidikan; serta peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Menejemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepala sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadahi bagi para peserta didik. Otonomi dalam menejemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kerja para staf, menawarkan partisipasi langsung ke kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.³

Sejak bergulirnya reformasi dan telah diundangkan UU Otonomi daerah, dan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah , dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (kini di sempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004), telah mengubah segala peraturan yang bersifat sentralisasi (top down) menjadi desentralisasi.⁴

Dalam prakteknya sekarang kita mengenal adanya peran masyarakat melalui keterlibatannya BP3 atau POMG. Namun kebanyakan kegiatannya hanya berkisar pada soal dana, sarana, atau bidang fisik saja. Namun dalam

³ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), Hlm. 24

⁴Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2006), Hlm. 65-66

peran Manajemen Berbasis Sekolah ini akan mengubah peran masyarakat atau komite sekolah semakin luas ikut menambah guru yang tidak ada, memberikan masukan dan mendiskusikan pelaksanaan pembelajaran, kinerja para guru, prestasi belajar anak, kendala yang dihadapi dan sebagainya. ini semua untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar sehingga semakin efektif.

Dalam sistem desentralisasi manajemennya berubah menjadi Manajemen Berbasis Sekolah yang di dalamnya ada Pemberdayaan Komite Sekolah, Secara resmi komite sekolah digulirkan sejak 2 April 2002. Keberadaan komite sekolah bersama dewan pendidikan secara legal formal telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 044/2002.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada April 2002,6 tahun yang lalu pemerintah kita melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menginstruksikan pembentukan Dewan Sekolah dan Komite Sekolah yang dimaksudkan untuk lebih memberdayakan masyarakat melalui wadahnya yang resmi yang disebut komite sekolah, sehingga masyarakat secara total berhak mengawasi, mendorong, dan membantu secara fisik, mental dan finansial kepada sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat benar-benar berfungsi sebagai man mestinya.

Sebagai langkah penerapan dari dari keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tersebut diatas serta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan adanya suatu kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan orang tua. Hal ini penting, karena sekolah memerlukan partisipasi masyarakat secara universal dalam menyusun program yang

relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam komite sekolah.

Dalam buku Himpunan keputusan Mendiknas Republik Indonesia⁵ disebutkan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Komite sekolah dapat diartikan juga sebagai suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsure yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Dalam surat keputusan (SK) Mendiknas No. 004/2002 tentang dewan pendidikan dan komite madrasah, butir 1.1 dinyatakan bahwa: Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.⁶

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka

⁵ Menteri Pendidikan Nasional. Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 77.

⁶ Anisa, Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabung Talun Blitar, Skripsi (Madang: UIN Malang, 2007) Hlm. 9-10

meningkatkan mutu pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan, di luar sekolah itulah yang melatarbelakangi pembentukan komite sekolah.

Pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah, dinas pendidikan wilayahnya dan pemerintah daerah lainnya. Peran komite sekolah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang propenas, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Di sini adanya keterlibatan masyarakat; dalam hal ini orang tua murid dan pengurus BP3 mempunyai peran penting terhadap kemajuan pendidikan sekolah terutama dalam proses belajar mengajar.⁷

Era otonomi daerah atas dasar Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 membawa nuansa baru dalam sistem pengelolaan pendidikan dan perkembangan pemikiran untuk melaksanakan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan

⁷ Ahmad safari, *Manajemen Berbasis Sokolah*, (Jatim: Penerbit SIC, 2001), Hlm. 32

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan.

Salah satu model pengelolaan pendidikan yang kini digagas Departemen Pendidikan Nasional adalah apa yang disebut dengan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemendirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalanya pendidikan di daerah masing-masing. Di samping pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, MBS juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua stakeholders pendidikan di sekolah.

Maka dari itu munculnya konsep MBS dimaksudkan untuk menciptakan sekolah sebagai tempat yang kondusif bagi layanan pendidikan, sehingga tercipta kemandirian sekolah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam wujud mutu hasil belajar para siswa. Maka dari itu kewenangan sekolah memungkinkan pula terjadinya peningkatan kinerja lembaga pendidikan sekolah sehingga perlu adanya Komite Sekolah.

Dalam kaitan persoalan diatas munculnya konsep MBS dapat dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan otonomi (kemandirian) dan profesionalisasi setiap satuan pendidikan (sekolah). Keberhasilan MBS tentu dapat ditentukan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggalu potensi masyarakat untuk menjamindemokratisasi, transparansi, dan akutabilitas. Keberadaan Komite

Sekolah di tingkat satuan pendidikan/sekolah sangat mendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS).

Berdasarkan dari paparan uraian diatas, komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan yang hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi sekolah maupun komite sekolah mengacu kepada kewenangan (otonomi) masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah, dinas pendidikan wilayahnya dan pemerintah daerah lainnya. peran komite sekolah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya. Ada beberapa kajian yang membahas tentang komite sekolah tetapi lebih peranannya sebagai penggalangan dana dan pembiayaan sekolah saja. sedangkan komite sekolah di sini lebih berperan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah.

Sebagaimana disinyalir bahwa disetiap sekolah-sekolah umum maupun swasta komite sekolah memang sudah terbentuk sejak diberlakukanya SK Mendiknas tentang komite sekolah, meskipun implementasinya di lapangan masih belum memuaskan semua pihak.

Tetapi , Peran komite sekolah dan wujud implementasinya di SMP Negeri 03 Kota Batu, bisa menjadi tolak ukur betapa pentingnya peran komite sekolah tersebut untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya di sekolah tersebut.

SMP Negeri 03 Kota Batu yang terletak di Jalan Diponegoro NO. 10 Beji Kota Batu, merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama yang telah mengembangkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah yang di dalamnya ada Pemberdayaan komite sekolah. SMP Negeri 03 Kota Batu berkeinginan untuk memacu dan mendukung proses kegiatan belajar mengajar dengan adanya kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam rangka mengembangkan program pendidikan yang berkualitas secara maksimal.

Oleh karena itu pula, dengan adanya peran komite sekolah yang semakin baik, SMP Negeri 03 Kota Batu berusaha untuk merealisasikan peran komite sekolah dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Dan dari pada itu Penelitian tentang Peranan Komite Sekolah di SMP Negeri 03 Kota Batu ini adalah penelitian yang pertama kali dan belum ada yang meneliti sebelumnya.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **“PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 03 KOTA BATU”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja peran komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu?
2. Bagaimana bentuk kerja sama komite sekolah dengan guru dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu
2. Kerja sama antara komite sekolah dengan guru dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang t erkait utamanya bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya komite sekolah dalam melaksanakan kerja sama dengan guru dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Sebagai masukan bagi sekolah bahwa dukungan komite sekolah sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan
3. sebagai masukan kepada penentu kebijakan pendidikan dalam hal ini adalah pemerintah untuk dapat memperhatikan peranan komite sekolah ini secara serius sehingga keberadaan badan ini dapat berhasil guna dan berdaya guna.
4. Dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya secara lebih mendalam.

E. Ruang Lingkup Pembahasan.

Untuk membatasi agar tidak terlalu luas dalam pembahasan ini, serta memperoleh gambaran seksama tentang materi penulisan ini, maka ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Peran komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu.
2. Kerja sama antara komite sekolah dengan guru dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Kota Batu.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang komite sekolah sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi mereka lebih banyak meneliti tentang komite madrasah. Penelitian tentang komite sekolah pernah diteliti oleh Imam Abu Mansyur, 2007. yang berjudul “Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Sunan Gunung Jati Gurah Kediri”. Dan penelitian yang dilakukan. Imam Abu Mansyur, 2007. Menjelaskan tentang peran Komite Sekolah di dalam pengembangan madrasah Tsanawiyah, karena di bentuknya komite madrasah oleh pihak madrasah yang mana kemudian komite madrasah tersebut diharapkan mampu mengatasi masalah dana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.

Madrasah dan komite madrasah berusaha untuk memperoleh dana yang berasal dari SPP, infaq, sumbangan sukarela orang tua atau sumbangan dari instansi-instansi atau donator yang peduli dengan pendidikan. Hanya saja apa

yang ditulis oleh Peneliti lebih fokus ke permasalahan *Dana guna peningkatan pengembangan madrasah*.

Sedangkan penelitian yang baru diteliti yang berjudul “ Peranan Komite Sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah pertama (SMP) Negeri 03 Kota Batu Belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, dan penelitian ini baru pertama kali dilakukan.

Menjelaskan tentang *bentuk kerja sama komite sekolah dengan guru* yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Serta dukungan pemikiran yang diberikan oleh komite sekolah kepada sekolah diwujudkan dengan memberi pertimbangan dalam menentukan program-program kerja, besarnya SPP, merancang RAPBS, bimbingan dan konseling siswa, kegiatan pembelajaran Guru, dan memecahkan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Bahan pertimbangan yang diberikan komite sekolah berasal dari aspirasi, ide dan tuntutan masyarakat yang ditampung dan diolah sedemikian rupa oleh komite sekolah. Pernyataan diatas untuk mengantisipasi kesalahfahaman terjadinya “plaglatisme, penjiplakan (duplikasi) atau daur ulang”.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa dan menyusun data-data ke dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang disusun seperti pada uraian berikut ini.

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari:

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan, penegasan istilah.

- BAB II Kajian Pustaka. Yang berisi tentang kajian pustaka yaitu: pengertian peran komite sekolah, penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu
- BAB III Metode Penelitian dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, tehnik sampling, analisis data, pengecekan keabsahan data. Tahapan penelitian.
- BAB IV Hasil Penelitian. yang berisi tentang data penelitian yang terdiri dari profil objek penelitian, peranan komite sekolah, pelaksanaan belajar mengajar, dan kerja sama komite sekolah dengan Guru dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Kota Batu
- BAB V Pembahasan hasil penelitian. yaitu berisi penyajian dan analisis data penelitian.
- BAB VI Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi tentang kesimpulan terhadap pembahasan data yang telah dianalisis dan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan.

H. Penegasan Istilah

1. Komite Sekolah

Komite sekolah adalah “suatu Lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan yng berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.⁸

2. Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.⁹

⁸ Undang-Undang RI No. 20 Th. 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003). Pasal 56. Hlm. 37.

⁹ Indar Djumberansyah, *Filsafat Pendidikan*, Abditama, Surabaya, 1994, hal. 16

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Peran Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, serta tuntutan pembangunan, perlu adanya dukungan serta peran serta masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan orang tua sangat diperlukan, mengingat sekolah memerlukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Dalam kamus bahasa Indonesia komite diartikan: badan; dewan; komisi; dan panitia.¹ Sedangkan kata “*sekolah*” dalam bahasa arab adalah “*madrasah*” yang berarti isim *makan* dari kata: *darsa-yadrusu-darsan-wa darusan,-wa dirosatan*, yang berarti: terhapus, hilang, menghapus, melatih, dan mempelajari. Dilihat dari pengertian ini maka “sekolah” berarti tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.²

¹ Adi gunawan, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya; Penerbit Kartika), Hlm. 250.

² Muhaimin, *pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada). Hlm. 184

Komite sekolah dalam pengertiannya berawal dari Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 044/ U/ 2002 yang tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, butir 1.1 dinyatakan bahwa komite sekolah / madrasah adalah “Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan, baik prasekolah, jalur sekolah maupun luar sekolah”.³

Sesuai dengan undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diungkapkan bahwa masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan komite sekolah.

Sedang pada butir 1.2 dinyatakan bahwa “Nama badan disesuaikan dengan kondisi hubungan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan luar sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, komite TK, atau nama lain yang disepakati”⁴

Sesuai dengan pasal 1.2 Surat Keputusan (SK) Mendiknas maka Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj. II/409/2003 mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah yang menyatakan bahwa:

³ Mendiknas, *lampiran II Surat Keputusan* No. 044/ U/ 2002, (Jakarta,2002), hlm.11.

⁴ *Ibid*, hlm.11.

“Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan: sekolah”⁵

Berdasarkan uraian diatas komite sekoalh merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan yang hirarkis dengan lembaga pemerintahan lainnya Komite sekolah merupakan perwujudan bentuk kerjasama sekolah dan masyarakat.

2. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah

Komite sekolah berkedudukan disetiap satuan pendidikan, yaitu sekolah. Pada setiap sekolah terdapat satu komite sekolah. Akan tetapi, dalam hal ini jika terdapat beberapa sekolah dalam satu lokasi, atau beberapa sekolah yang berbeda jenjang tetapi berada dalam satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa sekolah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lain, maka dapat dibentuk Koordinator Komite Sekolah (KKS).⁶Yang sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Peranan Komite Sekolah* adalah:

1. Pemberi pertimbangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan

⁵ SK. Dirjen Kelembagaan Agama Islam, hlm.8.

⁶ Ibid, Hlm 8.

2. Pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
3. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
4. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan, (Depdiknas,2002:2)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan sekaligus sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan ini.

Komite sekolah juga merupakan lembaga mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintahan. Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa komite sekolah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap penyusunan program dan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan pendidikan di sekolah.

Tata hubungan antara komite sekolah dengan satuan pendidikan (sekolah); Dewan Pendidikan (Tingkat Kabupaten/Kota), dan institusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan atau dengan komite-komite sekolah pada satuan pendidikan lain, bersifat koordinatif.

3. Tujuan Komite Sekolah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 44 tanggal 2 april tahun 2002 menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya komite sekolah adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam dunia penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komite sekolah itu dibentuk dalam rangka membantu menciptakan dan memelihara kelancaran dari proses belajar mengajar di suatu sekolah dengan melibatkan masyarakat secara total.

Sejalan dengan itu, Depdiknas melakukan prakarsa pembentukan komite sekolah yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 044/U/ 2002, tanggal 2 april 2002. Tujuan komite sekolah antara lain mewadahi peran serta masyarakat dalam kerangka pembangunan pendidikan yang memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, relevansi, dan peningkatan mutu.⁸

⁷ . Mendiknas, lampiran II Surat Keputusan No. 044/U/2002, (Jakarta: 2002), hlm. 11.

⁸ Sukirno, pedoman Kerja Komite Sekolah, (Tangerang: Agromedia Pustaka, 2006),hlm. 15

Dengan demikian tujuan adanya komite sekolah adalah untuk mewadahi berbagai aspirasi dari masyarakat dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara langsung masyarakat diberikan tanggung jawab dan pemberdayaan masyarakat dilingkungan satuan pendidikan untuk turut serta dalam peningkatan mutu dan pengembangan satuan pendidikan.

Antara masyarakat dengan pendidikan punya keterkaitan dan saling berperan. Kerena setiap warga masyarakat bercita-cita dan aktif berpartisipasi untuk membina pendidikan. Menurut Noor syam, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah dalam bukunya, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Mengemukakan bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan bersifat korelatif, bahkan seperti telur ayam. Masyarakat maju karena pendidikan, dan pendidikan maju hanya ditemukan dalam masyarakat yang maju pula.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan bergantung pada adanya partisipasi masyarakat, karena pendidikan yang maju terdapat dalam masyarakat yang maju.

Berdasarkan hal itu, berarti tujuan dibentuknya komite sekolah untuk melibatkan masyarakat dalam mengembangkan program pendidikan. Adanya tanggung jawab dari masyarakat untuk turut andil dalam pendidikan akan berdampak pada keberhasilan dan peningkatan kualitas pendidikan.

⁹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo,2001), hlm.96.

4. Fungsi dan Tugas Komite Sekolah

Komite Sekolah berfungsi sebagai “pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, bekerja sama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa segala aspirasi yang ada, memberikan masukan, mendorong, dan menggalang dana masyarakat”.¹⁰

Apabila kita perhatikan fungsi dari komite tersebut, maka sungguh besar fungsi dari badan ini. dimana pada satu sisi ia bertugas mendorong agar masyarakat peduli dan memperhatikan penyelenggaraan pendidikan, disisi lain ia juga berkewajiban menggalang dana masyarakat untuk kepentingan pendidikan di lingkungannya. Adapun fungsi dari komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Merumuskan penjabaran Visi dan Misi sekolah
5. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi pada sekolah tentang kriteria kepala sekolah.

¹⁰ Depdiknas, 2002. hlm. 2.

6. Menyusun Program operasional dan penjabaran kebijakan pendidikan pada sekolah
7. Menyusun Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
8. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.¹¹

Secara garis besar, fungsi dari komite sekolah yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Komite sekolah melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Fungsi lain adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Disamping itu fungsi komite sekolah adalah mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan penggalangan dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini juga melakukan kerja sama dengan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan

¹¹ *Ibid*, hlm. 107.

DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Apabila kita perhatikan fungsi dari komite tersebut, maka sungguh besar fungsi dari badan ini. dimana pada satu sisi komite sekolah bertugas mendorong agar masyarakat peduli dan memperhatikan penyelenggaraan pendidikan dan disisi lain komite sekolah juga berkewajiban menggalang dana masyarakat untuk kepentingan pendidikan dilingkungannya. Tugas komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
2. Bersama-sama seekolah menetapkan visi dan misi sekolah;
3. Bersama-sama sekolah menyusun standar pembelajaran di sekolah.
4. Bersama-sama sekolah menyusun rencana strategis dibidang penyelenggaraan pembelajaran;
5. Bersama-sama sekolah menyusun dan menetapkan rencana program sekolah, termasuk RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah);
6. Bersama-sama sekolah mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan baik yang bersifat akademis (nilai tes harian, ulangan semester, dan UAN) maupun yang bersifat non akademis (keagamaan,

olahraga, seni dan keterampilan yang ada di sekolah, pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan teknologi yang sederhana);

7. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
8. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara standar nasional maupun lokal;
9. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan.¹²

Salah satu tugas komite sekolah itu adalah “sebagai mitra kerja kepala sekolah dan dewan guru untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar-mengajar di satuan pendidikan”.¹³

Sedangkan wewenang komite sekolah adalah sebagai pengawas dari pelaksanaan proses belajar mengajar, dan sekaligus sebagai kepanjangan tangan dari wali murid atau orang tua murid dalam menyampaikan ide dan saran untuk kemajuan dari proses belajar mengajar.

5. Pembentukan Komite Sekolah

a. Prinsip Pembentukan Komite Sekolah.

Komite sekolah dibentuk dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi.
- b) Merupakan mitra satuan pendidikan.¹⁴

¹² SK Dirjen Kelembagaan Islam Depag RI .*Tentang pedoman pembentukan komite madrasah* , hlm.23-25

¹³ Depdiknas, 2002, hlm, 4.

Komite sekolah dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas melalui pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

b. Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah.¹⁵

1. Pembentukan panitia persiapan

Masyarakat atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan terdiri dari kalangan praktisi pendidikan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan komite sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁴ SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam. Op. cit, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 13.

- a Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/ anggota BP3, majelis sekoalh yang telah ada) tentang komite sekolah menurut keputusan ini;
- b Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan masyarakat; 1). Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat; 2). Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat; 3). Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah; 4). Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada satuan pendidikan.
- c Penetapan Pembentukan Komite Sekolah. Komite sekolah ditetapkan untuk pertama kalinya dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.¹⁶

6. Landasan Terbentuknya Komite Madrasah.

Sedangkan landasan terbentuknya komite sekolah¹⁷ adalah:

- 1) Landasan Yudisial Hal ini diatur dalam:
 - a) UUSPN tahun 2003 Pada pasal 56, yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi

¹⁶ SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam, op. cit. hlm.13.

¹⁷ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 96.

program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah”.¹⁸

- b) Lampiran II Keputusan Mendiknas No. 004/U /2003, pada butir 1.2 dinyatakan bahwa: nama badan disesuaikan dengan kondisi hubungan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan, komite madrasah, komite pendidikan luar sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, komite TK, atau nama lain yang disepakati.¹⁹
- c) Lampiran Surat Keputusan (SK) direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/409/2003 tentang pedoman pembentukan komite sekolah.
- d) UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) 2000-2004

Pembentukan komite sekolah yang telah ditetapkan dalam keputusan Mendiknas No.004/ U /2002, juga merupakan amanat dari UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) 2000-2004, dimana dinyatakan bahwa sasaran yang akan dicapai dalam program pembinaan pendidikan dasar dan menengah di antaranya terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (school/community

¹⁸ *Ibid*, hlm 15.

¹⁹ Mendiknas, Lampiran II, hlm. 11.

based management) dengan mengenakan konsep dan merintis pembentukan komite di setiap sekolah.

2) Landasan Empiris Landasan Empiris ini mengacu pada:

- a) Laporan Beberapa lembaga pendidikan.
- b) Desentralisasi pendidikan.
- c) Perkembangan kehidupan dunia.
- d) Semakin terbatasnya sumber dana.

3) Landasan Teoritis

Selama ini pendidikan formal hanya dibawah naungan pusat, sehingga peran serta masyarakat sangat terbatas.

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan jalan melakukan hubungan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat yang diwakillioleh wali murid dengan berpedoman pada tujuan sebagai berikut.²⁰

- a) Saling membantu dan saling mengisi; guru dapat memberikan informasi kepada orang tua tentang anaknya berkaitan dengan segi-segi yang positif dan negative; informasi ini dapat dilakukan melalui rapat-rapat komite maupun kunjungan guru. Dengan memahami kekurangan anak guru dapat bekerja sama dengan orang tua/wali murid dalam melakukan pembinaan anaknya.

²⁰ E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: Rineka Cipta, 2002) hlm. 143.

- b) Bantuan keuangan dan barang-barang; orang tua peserta didik yang mengetahui adanya kekurangan-kekurangan di sekolah dapat memberikan bantuan keuangan di sekolah/madrasah melalui komite sekolah.
- c) Untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang kurang baik, antara sekolah dan masyarakat.
- d) Bersama-sama membentuk visi dan misi, dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dari beberapa landasan terbentuknya komite sekolah merupakan wadah peran serta masyarakat yang memiliki landasan yang kuat, sehingga dalam menjalankan perannya komite sekolah dengan pedoman yang ada. Dengan adanya pedoman landasan terbentuknya komite sekolah tersebut, komite sekolah selalu berupaya untuk menjalin hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan masyarakat.

7. Struktur Organisasi Komite Sekolah

a. Keanggotaan Komite Sekolah

Anggota komite sekolah berasal dari unsure-unsur masyarakat. Dari perwakilan orang tua/ wali peserta didik, berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis; tokoh masyarakat (ketua RT/RW, kepala dusun, ulama, pemuka adapt); anggota masyarakat yang mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan; pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/ Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, dan

instansi lain); dunia industri/ usaha; pakar pendidikan; organisasi perwakilan siswa, perwakilan alumni yang telah dewasa dan mandiri.²¹

Dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam No. Dj. II/409/2003 tentang pedoman pembentukan komite sekolah/ madrasah dijelaskan bahwa keanggotaan komite sekolah/ madrasah terdiri atas:

- 1) Unsur masyarakat yang berasal dari: orang tua/ wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan/ akademisi; dunia usaha/industri/pengusaha; organisasi profesi tenaga pendidikan; wakil alumni; dan, khusus untuk jenjang pendidikan menengah, wakil peserta didik;
- 2) Unsur dewan guru paling sedikit 15 % dari jumlah anggota komite sekolah;
- 3) Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan;
- 4) Badan pertimbangan Desa atau lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai komite sekolah;
- 5) Perwakilan organisasi siswa;
- 6) Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlah yang gasal, yang ditetapkan dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).²²

²¹ SK Dirjen Kelembagaan Islam Depag RI, op. cit, hlm. 23-25.

²² *Ibid*, hlm. 107.

Struktur kepengurusan komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara. Apabila dipandang perlu kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada. Selain itu, dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi.

Dalam ayat berikut ini disebutkan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط

فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ

سُحُبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Qs. Ali Imran 159).²³

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art(J-ART), 2004), Hlm 72

Dari ayat diatas jelas bawasanya kita hidup di dunia ini membutuhkan orang lain dan segala sesuatunya harus di musyawarahkan dengan baik sehingga hasilnya sesuai kesepakatan bersama dan bisa diwujudkan dengan semangat yang tinggi dan ikhlas.

b. Kepengurusan Komite Sekolah

Adapun kepengurusan komite sekolah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengurus komite sekolah sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. Ketua.
 - 2. Sekretaris.
 - 3. Bendahara.
- b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
- c. Ketua komite sekolah bukan berasal dari sekolah.

Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani administrasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keanggotaan komite sekolah berasal dari beberapa unsure, yaitu unsure masyarakat dan unsure guru dengan kriteria tertentu serta unsure-unsur anggota antara satuan pendidikan. Sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus komite sekolah dapat melaksanakan koordinasi secara baik untuk mencapai tujuan dari dibentuknya komite sekolah.

Sebagai mitra kerja kepala sekolah berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar disekolah termasuk dalam memberikan masukan, saran, dan kritikan kepada pihak sekolah, bahkan bila diperlukan komite sekolah dapat menghimpun dana di masyarakat untuk keperluan dan kelancaran proses belajar mengajar.

8. Peran Komite Sekolah

Komite sekolah mempunyai peran yang sangat strategis, yaitu sebagai wadah untuk menyalurkan peran serta masyarakat dalam pendidikan lebih tegas disebutkan dalam keputusan Mendiknas No. 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan komite sekolah. Baik Dewan Pendidikan maupun komite sekolah, mereka berperan sebagai:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
- d. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Komite sekolah sebagai badan pertimbangan bagi sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra kerja Kepala Sekolah yang dapat diajak musyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui komite

sekolah orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan, program, dan kegiatan sekolah.

Peranan komite sekolah sebagai pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat berupa dukungan financial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan pendidikan.

Peran pengawasan yang dijalankan oleh komite sekolah merupakan jenis pengawasan masyarakat. Fungsi pengawasan yang dilakukan meliputi control terhadap pengambilan dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah yang dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas/mutu pendidikan.

Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Selain itu, aspirasi orang tua dan masyarakat secara langsung

dapat disalurkan oleh masyarakat kepada kepala sekolah dan guru. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua siswa dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan komite sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite sekolah yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Dalam buku acuan operasional dan indikator kinerja komite sekolah²⁴. Dijelaskan, bahwa komite sekolah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasional komite sekolah, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), indicator kerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai:
 - a. Kebijakan pendidikan;
 - b. Program pendidikan;
 - c. Rancangan anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS);

²⁴ Departemen Pendidikan nasional. Acuan Operasional dan indikator Kinerja Komite Sekolah.(Jakarta: dirjen Dikdasmen,2004).

- d. Kriteria kinerja satuan;
 - e. Kriteria tenaga kependidikan;
 - f. Kriteria fasilitas pendidikan.
2. peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*), indikator kerjanya yaitu:
- a. Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan;
 - b. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan;
 - c. Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan;
 - d. Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - e. Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*), indikator kinerjanya yaitu :
- a. Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan.
4. Peran komite sekolah sebagai mediator, indikator kinerjanya yaitu:
- a. Melakukan kerja sama dengan masyarakat;

- b. Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- c. Menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Selain peran yang telah disebutkann di atas, peran nyata yang dilaksanakan komite sekolah adalah sebagai mitra atau patner bagi pemerintah daerah atau sekolah. Badan ini memiliki peran sebatas memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah, serta memberikan dukungan,control, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

B. Penyelenggaraan Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan.

Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.²⁵

Ada beberapa konsep pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- 1) Tim Dosen IKIP Malang menyimpulkan pengertian pendidikan sebagai :
 - a. Aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya yaitu rohani (fikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indra serta keterampilan-keterampilan).

²⁵ Indar Djumberansyah, *Filsafat Pendidikan*, Abditama, Surabaya, 1994, hal. 16

- b. Lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi : keluarga, sekolah dan masyarakat (negara).
 - c. Hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya.
- 2) Sebagaimana yang dikutip oleh Djumberansyah Indar dalam bukunya bukunya Freeman Butt yang berjudul *Cultural History of Western Education*, bahwa :
- a. Pendidikan adalah kegiatan menerima dan memberikan pengetahuan sehingga kebudayaan dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya.
 - b. Pendidikan adalah suatu proses. Melalui proses ini individu diajarkan kesetiaan dan kesediaan untuk mengikuti aturan. Melalui cara ini pikiran manusia dilatih dan kembangkan.
 - c. Pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan. Dalam proses ini individu dibantu pengembangan kekuatan, bakat, kesanggupan dan minatnya.
 - d. Pendidikan adalah rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman yang menambah arti serta yang menambah kesanggupan untuk memberikan arah bagi pengalaman selanjutnya.
 - e. Pendidikan adalah suatu proses. Melalui proses ini seseorang menyesuaikan diri dengan unsur-unsur pengalamannya yang menjadi kepribadian modern sehingga dapat mempersiapkan diri bagi kehidupan masa dewasa yang berhasil.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan tadi, maka terdapat beberapa ciri atau unsur umum dalam pendidikan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu individu yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai seorang individu, maupun sebagai warga negara atau warga masyarakat.

²⁶ Ibid, hal. 19-20

- 2) Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha yang disengaja dan terencana untuk memilih isi (bahan materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai.
- 3) Kegiatan tersebut dapat diberikan dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat berupa pendidikan jalur sekolah (formal), dan pendidikan jalur luar sekolah (informal dan non formal).

2. Dasar Pendidikan

Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah landasan tempat berpijak atau sandaran daripada dilakukannya suatu perbuatan. Dengan demikian, yang dijadikan landasan atau sandaran suatu perbuatan itu sudah ada dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karenanya tidaklah dapat dibenarkan pertanggungjawaban suatu tindakan atau usaha yang berpijak pada landasan yang dicari-cari alasannya untuk kepentingan diri atau golongan.²⁷

Adapun dasar pendidikan itu sendiri dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya :

- a. Dasar dari segi yuridis atau hukum adalah dasar-dasar pelaksanaan agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung yagn mana hal ini dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan baik di lembaga formal maupun non formal.

²⁷ Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, jakarta, 1991, hal. 190

- b. Dasar religius yaitu dasar yang berdasarkan dari ajaran agama Islam yang tertera dalam ayat al-Quran dan Al-Hadits menurut ajaran agama Islam bahwa pelaksanaan pendidikan adalah wajib.
- c. Dasar sosial psikologi yaitu manusia membutuhkan suatu pegangan hidup yaitu agama, dan dalam kenyataannya agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Dan pada hakekatnya masyarakat akan merasa aman, tenang, dan tentram hatinya apabila bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhannya.²⁸

3. Tujuan Pendidikan

Sebagaimana yang dikutip oleh M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Langeveld yang berjudul *Beknopte Theoretische Paedagogiek*, mengutarakan macam-macam tujuan pendidikan sebagai berikut:

a. Tujuan umum

Tujuan umum disebut juga tujuan sempurna, tujuan akhir atau tujuan bulat. Tujuan umum ialah tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau lain-lain pendidik, yang telah ditetapkan oleh pendidik dan selalu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat pada anak didik itu sendiri dan dihubungkan dengan syarat-syarat dan alat-alat untuk mencapai tujuan umum itu.

b. Tujuan-tujuan tak sempurna

²⁸ Zuhairini et.al, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Ramadhani, Solo, 1983, hal 31.

Yang dimaksud dengan tujuan tak sempurna atau tak lengkap ini ialah tujuan-tujuan yang mengenai segi-segi kepibadian manusia yang tertentu yang hendak dicapai dengan pendidikan itu. Yaitu segi-segi yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup yang tertentu seperti keindahan kesusilaan, keagamaan, kemasyarakatan dll.

c. Tujuan-tujuan sementara

Tujuan sementara ini merupakan tempat-tempat perhentian sementara pada jalan yang menuju ke tujuan umum. Untuk mencapai tujuan-tujuan sementara itu di dalam praktek harus mengingat dan memperhatikan jalannya perkembangan pada anak. Untuk itu diperlukan psikologi perkembangan.

d. Tujuan-tujuan perantara

Tujuan ini ditentukan tergantung pada tujuan-tujuan sementara

e. Tujuan Insidental

Tujuan ini hanya sebagai kejadian-kejadian yang merupakan saat-saat yang terlepas pada jalan yang menuju kepada tujuan umum.²⁹

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan di atas dan hubungannya satu sama lain, mempermudah usaha kita hendak mengerti pekerjaan mendidik, dan memungkinkan kita meminjau apa yang dianjurkan oleh aliran-aliran modern atau aliran-aliran kuno dalam pendidikan. Sedangkan tujuan umum itu bermuara dalam pandangan hidup yang mendukung sebagai batu dasarnya.

²⁹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Karya CV, Bandung, 1988, hal. 24-28

4. Kualitas Pendidikan

Pendidikan, dari segi kehidupan kultur umat manusia tidak lain adalah sebagai salah satu alat pembudayaan masyarakat manusia itu sendiri. Sebagai suatu alat pendidikan dapat difungsikan untuk mengarahkan perkembangan dan pertumbuhan hidup manusia. Sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial kepada titik optimal kemampuan untuk memperoleh kesejahteraan hidup dunia maupun akhirat. Untuk itulah maka pendidikan harus benar-benar memiliki kualitas bagi manusia.

Adapun hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain :

a. Peningkatan Profesionalisme Guru

Untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam pendidikan agama, perlu ditingkatkan melalui cara-cara antara lain:

1) Mengikuti Penataran

Menurut para ahli:

“Penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru dan pegawai guna menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidangnya masing-masing.”³⁰

Sedangkan kegiatan penataran itu sendiri ditujukan :

- Mempertinggi mutu petugas dalam bidang profesinya masing-masing.

³⁰ I.Djumhur dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, CV Ilmu, Bandung, 1975, hal 115

- Meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal
- Perkembangan kegairahan kerja dan peningkatan kesejahteraan.³¹

2) Mengikuti Kursus-Kursus Kependidikan

Hal ini untuk menambah wawasan terutama guru agama. Adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan bahasa (Arab dan Inggris), komputer dan lain sebagainya.

3) Memperbanyak Membaca

Menjadi guru yang profesional tidak hanya menguasai atau berpedoman hanya pada satu atau beberapa buku. Akan tetapi, sebagai guru profesional harus banyak membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan.

4) Mengadakan Kunjungan Ke Sekolah Lain

Adalah hal yang sangat penting bagi seorang guru mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Dalam hal ini bias dilakukan dengan melakukan studi banding, bertukar pikiran dan bertukar informasi sehingga akan menambah dan melengkapi pengetahuan yang dimilikinya.

b. Peningkatan Materi

Adapun usaha-usaha yang mungkin dilakukan adalah :

1) Menambah Jam Pelajaran

Alokasi waktu pelajaran Islam merupakan kendala. Sebab materi yang disampaikan sangat banyak berdasarkan rumusan kurikulum yang ada.

³¹ *Ibid*, hal 115

Penambahan jam ini dimaksudkan, pertama: agar materi yang disampaikan dapat terpenuhi, kedua: guru memiliki waktu yang cukup sehingga dapat menerangkan materi yang ada secara jelas dan gamblang.

2) Pengorganisasian Materi

Banyaknya materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, maka diperlukan adanya pengorganisasian materi. Sehingga materi tersebut akan tersampaikan seluruhnya. Dengan pernyataan Dra. Roestiyah N.K, bahwa:

“Materi pendidikan tidak mungkin dapat asal saja, tetapi harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh siswa dengan baik. Tujuan pengorganisasian pelajaran adalah agar guru lebih memperhatikan urutan (*sequence*) dari materi yang akan diberikan sesuai tujuan instruksional yang telah dituangkan.”³²

3) Menyesuaikan tingkat materi pendidikan dengan kemampuan siswa serta waktu yang tersedia.

Hal ini dilakukan karena materi pendidikan bukan merupakan bahan jadi yang tinggal diberikan kepada siswanya, tetapi perlu pengolahan yang sedemikian rupa sehingga mempermudah siswa untuk menerimanya.

c. Peningkatan Pemakaian Metode

Pemakaian metode ini hendaknya bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga siswa tidak akan pernah merasa bosan. Untuk itulah dalam menyampaikan metode, guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Selalu berorientasi pada tujuan.

³² Roestiyah Nk, *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal 63

- Tidak hanya terikat pada satu alternatif saja.
- Sering mengkombinasikan berbagai metode.
- Sering berganti-ganti dari satu metode ke metode lainnya.³³

d. Peningkatan Sarana

“Sarana adalah alat, metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.”³⁴

Dalam upaya peningkatan sarana tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengerti secara mendalam tentang fungsi atau kegunaan media pendidikan.
- Mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi belajar mengajar.
- Pembuatan alat-alat media harus mudah dan sederhana.
- Memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang diajarkan.³⁵

e. Membangkitkan Motivasi Belajar

Motivasi adalah sebagai pendorong bagi siswa dalam menumbuhkan dan menggerakkan bakat mereka secara integral dalam dunia belajar.

Dalam hal ini guru dapat menggunakan bermacam-macam motivasi agar murid-murid giat dalam belajar. Adapun motivasi yang dapat diberikan

kepada siswa, antara lain :

- a) Pemberian hadiah
- b) Mengadakan persaingan atau kompetisi
- c) Selalu mengadakan appersepsi dan evaluasi
- d) Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan
- e) Pemberian pujian

³³ Tiem didaktik metodik kurikulum IKP Surabaya, *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM*, Rajawali, Jakarta, 1989, hal 39

³⁴ Roestiyah Nk, *Op. Cit*, hal 67

³⁵ *Ibid*, hal 69

- f) Pemberian minat belajar
- g) Pemberian hukuman
- h) Adanya suasana belajar yang menyenangkan.³⁶

5. Tinjauan Tentang Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan rohani yang harus dipenuhi secara utuh agar manusia mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya sebagai kholifah dimuka bumi dengan sempurna.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78, disebutkan:

(i) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة النحل : 78)

Artinya:

" Dan Allah SWT mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur". (QS. An-Nahl : 78)³⁷

Bumi diciptakan Allah memang bukan hanya untuk tempat hidup manusia saja namun masih banyak fungsinya, diantaranya yaitu tempat untuk manusia mencari ilmu pengetahuan yang luas. Pendidikan merupakan sebuah tuntutan kebutuhan secara alamiah yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menghadapi persoalan dunia maupun akhirat.

(j) أُطِيبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ (رواه ابن عبد البر)

Artinya:

³⁶ S. Nasution, *Didaktik Asas-asas Mengajar*, Jemmars, Bandung, 1986, hal 81
³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Al-Hidayah, 1998, hlm. 413

" Tuntutlah ilmu semenjak dari buaian sampai keliang lahat". (HR. Ibnu Abd. Bar)³⁸

Hadits Rasulullah SAW tersebut telah menunjukkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu tanpa mengenal waktu. Hadits tersebut juga menunjukkan kepada kita pentingnya pendidikan terhadap kehidupan kita.

Pendidikan yang merupakan sebuah wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting atas peranannya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan juga merupakan humant investment yang akan dapat memberikan keuntungan besar jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan secara simultan pendidikan dapat memberikan keunggulan komperatif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan global masa kini dan masa yang akan datang.

Karena pentingnya peranan pendidikan terhadap kemajuan dan perkembangan peradaban manusia, maka masalah pendidikan adalah suatu hal yang nyata dan merupakan sebuah wacana yang hangat untuk dibicarakan dan didiskusikan baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan awam.

Dalam UU SISDIKNAS BAB II Pasal 2 disebutkan bahwa "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam

³⁸ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Agustus 1984, hlm. 5

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.³⁹

Isi UU SISDIKNAS BAB II Pasal 2 tersebut merupakan cita-cita Negara Indonesia untuk memberikan pengetahuan kepada warga negaranya lewat pendidikan nasional agar supaya seluruh warga negara beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

³⁹ Sistem Pendidikan Nasional, No. 20, Th. 2003, Citra Umbara, hlm. 7

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodelogi adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian terutama untuk data yang dikumpulkan. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

Menurut Hadi “Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengungkapkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha penelitian dimana dilakukan dengan metode-metode ilmiah”.¹

Dalam upaya mendapatkan dan mengumpulkan data dari kegiatan penelitian digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian tentang Peran Komite Sekolah dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu , peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyaek penelitian.²

Penelitian kualitatif memiliki perbedaan ciri-ciri dengan penelitian lain. Berikut ini merupakan pengkajian dan sintesis dari Bogdam dan Lincoln dan Guba antara lain: Menggunakan latar alamiah, manusia sebagai alat (instrument),

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (yogyakarta: Andi offset, 1987), Hlm,4.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 6.

metode kualitatif (yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen), analisis data secara induktif, teori dari dasar (grounded theory), deskriptif (data yang ikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data.³ Peneliti berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apakah peran komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu sudah sesuai dengan Surat Keputusan mendiknas No. 004/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah yang mempunyai peran sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
3. Pengontrol (controlling agency), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((legislatif) dengan masyarakat.

Yang telah disimpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dibahas menurut realitas yang sebenarnya secara berurutan.

Sedangkan menurut Anslan dan Juliet terdapat banyak alasan dalam menggunakan metode kualitatif antara lain: untuk mendapatkan hasil yang

³Lexy J. Moleong. *Op. cit*, hlm 8-12 .

mantap dan menjadikan peneliti sebagai instrument penelitian, untuk dapat mengungkapkan dan menghadapi fenomena yang sedikitpun belum diketahui, dan metode kualitatif memberikan rincian kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan melalui metode kuantitatif.⁴

Dalam mengkaji tentang Peran Komite Sekolah dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Batu , peneliti bermaksud memahami realitas empirik dari fenomena-fenomena yang mudah untuk dipahami dan dimaknai berdasarkan interpretasi penulis. Kemudian dibandingkan dengan hasil kajian peneliti sebelumnya. Tentu saja dalam memaknai dan menginterpretasikan informasi data, penulis menggunakan referensi untuk dijadikan acuan atau sandaran dan penguat data yang ditemukan dilapangan. Adapun penelitian yang dilakukan disini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif menurut Subana penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data bukan untuk mengolah hipotesis (kalau ada), hasil analisis itu mendeskripsikan gejala-gejala yang diamati.⁵

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan, penelitian tentang Peran Komite Sekolah dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 03 kota Batu menggunakan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif.

⁴ M. Subana dan Suderajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 21.

⁵ Ibid, Hlm 21..

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri.⁶ Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan syarat yang utama, peneliti mengumpulkan data dalam latar belakang ilmiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci.

Jadi kunci penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Karena ia bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Sedangkan instrument selain manusia mempunyai fungsi terbatas, yaitu hanya sebagai pendukung. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek/ informan. Hal ini dikarenakan sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah mengantarkan surat ijin penelitian terhadap lembaga yang bersangkutan. Adapun peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat tanpa peran serta, pengamat hanya satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian beserta keterangan mengenai tempat, jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di SMP Negeri 03 Kota Batu, Jalan. Diponegoro No.90 Beji Kota Batu Telp. 0341-710908.

⁶ Ibid, Hlm, 21..

D. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta/ angka. Menurut sumber lain sumber data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informan, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.⁷ Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah mengenai Peran Komite Sekolah dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan .

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh.⁸ Jadi sumber data ini menunjukkan asal informasi. Data ini harus diperoleh dari sumber data yang tepat. Jika sumber data tidak tepat maka mengakibatkan data yang dikumpulkan tidak relevan dengan masalah yang diselidiki.

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah kata tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.⁹

Sumber data adalah menjelaskan tentang di mana diperolehnya data dan sifat data yang dikumpulkan, serta orang-orang yang dimintai keterangan

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 96.

⁸ *Ibid.* hlm. 171.

⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 157.

sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Orang-orang yang dimintai keterangan disebut subyek/ responden.

Subyek penelitian adalah sumber di mana peneliti memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian.¹⁰ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto sebagai mana telah disebutkan dalam beberapa contohnya dapat ditarik kesimpulan, subyek adalah seseorang/ lebih yang sengaja dipilih oleh peneliti guna dijadikan nara sumber data yang dikumpulkan.¹¹

Dasar pertimbangan pemilihan orang tersebut adalah karena ia menguasai bidang permasalahan dan tugas-tugasnya. Sedangkan yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu
2. Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 03 Kota batu
3. Guru SMP Negeri 03 Kota Batu.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Metode Observasi.

¹⁰ Tatang, Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 92.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, hlm. 113.

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap kenyataan-kenyataan yang akan diselidiki.

Metode observasi sering diartikan sebagai pengamatan, yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap dan peraba).¹²

Dalam metode observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung gejala-gejala yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 03 Kota Batu , serta pencatatan dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.

b) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹³ Metode dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan dokumen yang ada (bahan tertulis, gambar-gambar penting, atau film yang mendukung obyektifitas penelitian).

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang:

1. Latar belakang berdirinya SMP Negeri 3 Kota Batu
2. Visi dan misi SMP Negeri 3 Kota Batu
3. Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Kota Batu.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 186.

¹³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 186.

4. Data Guru dan Siswa SMP Negeri 3 Kota Batu

c) Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁴

Dari dua rujukan di atas, dapat memberi arahan dan landasan bagi peneliti bahwa melalui kegiatan wawancara diharapkan memperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan subyek yang diteliti tentang berbagai hal yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui interview dengan kepala sekolah, pengurus komite sekolah, waka sarana prasarana serta perwakilan dari pihak Guru SMP Negeri 3 Kota Batu, mengenai peranan komite sekolah dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar guru. metode ini juga digunakan untuk memproses data-data yang diperoleh melalui metode observasi dan metode dokumentasi. Diantaranya tentang:

1. Sejarah berdirinya komite sekolah
2. Sistematisa pembentukan komite sekolah.
3. Peranan komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 178.

F. Analisis Data

Analisis merupakan tahap akhir terhadap apa yang dilakukan selama berada di lapangan. Analisis data merupakan suatu proses pengaturan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formula untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) yang disarankan oleh data. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan menjadi: analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁵

Adapun tujuan-tujuan dari analisis data ini adalah, sebagaimana dikemukakan oleh Surahmad diantaranya yaitu:

1. Mengumpulkan informasi actual secara terperinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data-data yang memperlihatkan kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
3. Melakukan evaluasi atau (jika mungkin) membuat komparasi.¹⁶

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisis data dilakukan adalah analisis data secara induktif. Analisis data

¹⁵ Lexy J. Moleong. Op, cit. hlm. 103.

¹⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: 1989), hlm. 132.

secara induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam kata yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang dihtisar dari kata dasar. Analisis data kualitatif dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai di mana data tersebut secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan utuh dan sempurna.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau validitas data yang merupakan pembuktian bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di dunia nyata. Untuk mengetahui keabsahan data maka tehnik yang digunakan adalah:

a. Triagulasi

Triagulasi adalah pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan/ sebagai pembanding data itu.¹⁷ *Triagulasi* merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sumber informasi dan tehnik-tehnik. Misalnya hasil observasi dapat dicek dengan hasil wawancara atau membaca laporan, serta melihat yang lebih tajam hubungan dengan beberapa data.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Penggunaan bahan referensi sangat membantu memudahkan peneliti dalam pengecekan keabsahan data, karena dari referensi yang ada sebagai pendukung dari observasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

¹⁷ Lexy j. Moleong, *Metodologi*. Op. cit. hlm.178.

Menurut Eister (1975) kecukupan referensi sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan tehnik tertulis untuk keperluan evaluasi.¹⁸

c. Member Check.

Bertujuan agar informasi yang peneliti peroleh dan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan apa yang dimaksud oleh informan. Setelah peneliti mentranskrip catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan atau mempelajari dokumen. Kemudian mendeskripsikan dan memaknai data secara tertulis. Kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi dan jika perlu adanya penambahan data baru. Member check ini dilakukan segera setelah data yang masuk dari nara sumber.

H. Tahapan Penelitian.

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi:

- a. Tahap Pendahuluan. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:
 1. Pengajuan judul proposal kepada jurusan, dalam hal ini Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Konsultasi Proposal kepada dosen pembimbing.
 3. Melakukan kegiatan pustaka yang sesuai dengan judul penelitian.
 4. Menyusun metodologi penelitian.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 181.

5. Mengurus surat izin penelitian kepada Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang diajukan kepada Lembaga Pendidikan SMP Negeri 3 Kota Batu

b. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: Mengadakan observasi langsung ke SMP Negeri 03 Kota Batu:

1. Melakukan wawancara kepada subyek penelitian.
2. Menggali data untuk menunjang penelitian melalui dokumen yang diperlukan.
3. Mengelola data dengan cara yang telah diperoleh dari hasil penelitian dengan analisis data yang telah ditetapkan.
4. Tahap Penyelesaian. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap penyelesaian meliputi:
 1. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian.
 2. Menyusun laporan hasil penelitian dengan selalu konsultasi kepada dosen pembimbing.
 3. Ujian pertanggung jawaban di depan dosen penguji.
 4. Penggandaan dan penyampaian hasil laporan kepada pihak yang berwenang dan berkepentingan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 03 Kota Batu

Penelitian ini mengambil obyek di SMP Negeri 03 Kota Batu, yaitu salah satu Sekolah Menengah Pertama di Jl. Raya Beji No. 8 Beji.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H .Sudjud Lamudjiyanto. M.Pd. tentang sejarah berdirinya SMP Negeri 03 Kota Batu adalah “Tanah yang sekarang dibangun SMP Negeri Kota Batu ini adalah merupakan tanah Hibah dari masyarakat sekitar yang dahulunya adalah tanah persawahan, dikarenakan semakin banyaknya anak-anak yang membutuhkan pendidikan maka dengan kesadaran masyarakat sekitar menghibakan tanah persawahan mereka untuk dibangun SMP Negeri 03 Kota Batu”.¹

SMP Negeri 03 Kota Batu di bangun diatas tanah dengan luas kurang lebih 1 hektar yang berlokasi di Jl. Raya Beji No. 8 Beji Kecamatan Junrejo. Tanah SMP Negeri 03 Kota Batu merupakan tanah hiba dari rakyat yang dahulunya merupakan tanah persawahan, karena pembangunan yang pesat dan anak-anak membutuhkan tempat pendidikan maka rakyat menghibakan tanahnya untuk di bangun SMP Negeri 03 Kota Batu. SMP ini

¹ Wawancara dengan Bapak kepala Sekolah SMPN 03 Kota Batu, sudjud, lamundjiato M.Pd, tanggal 20 mei 2011 di kantor kepala sekolah.

dibangun pada tahun 1982 dan beroperasi tahun 1983, sampai saat ini telah memiliki 2 unit gedung bertingkat, 4 unit gedung permanen.

2. Visi dan Misi SMP Negeri 03 Kota Batu

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai Visi SMP Negeri 03 Kota Batu:

”Visi SMP Negeri 03 Kota Batu:

”Unggul dalam Imtaq dan Ipteq serta Bermoral”.²

Sedangkan Misi SMP Negeri 03 Kota Batu:

1. Meningkatkan Pembelajaran dan Bimbingan secara efektif dan efisien
2. Meningkatkan prestasi akademik
3. Meningkatkan pembelajaran di bidang olah raga dan seni
4. Meningkatkan kehidupan budaya, belajar tertib dan bersih
5. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut setiap warga sekolah”.³

3. Tujuan SMP Negeri 03 Kota Batu

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu dapat dijelaskan sebagai berikut:

”Salah satu tujuan SMP Negeri 03 Kota Batu adalah untuk mengetahui potensi sekolah secara keseluruhan dan bagaimana potensi yang ada dapat dikembangkan dan diolah sebaik mungkin serta

² Ibid

³ Dokumentasi smp Negeri 03 Kota Batu

meningkatkan kualitas sumber daya sekolah dalam pelayanan peningkatan mutu pendidikan.”⁴

1. Mengetahui semua potensi sekolah dan bagaimana potensi yang ada dapat diolah dan dikembangkan
2. Merencanakan pengembangan potensi yang ada dalam meningkatkan kualitas sumber daya di SMP Negeri 03 Kota Batu.
3. Memiliki pedoman operasional dalam mengelola sekolah.
4. Memiliki tolok ukur keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam mengelola sekolah.
5. Mengetahui masalah-masalah yang menjadi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan pengembangan sekolah serta alternatif pemecahan.
6. Mengetahui berbagai sumber daya dan sumber belajar yang bisa dimanfaatkan untuk memperlancar pengelolaan dan meningkatkan pengembangan sekolah.
7. Meningkatkan pembinaan sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan profesionalisme guru
8. Meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang diwarnai oleh moral kerja tenaga pendidikan yang ada di sekolah
9. Memantapkan apa yang harus dikerjakan dengan menentukan skala prioritas
10. Untuk memperoleh diskripsi tentang :

⁴ Wawancara dengan Bapak kepala Sekolah SMPN 03 Kota Batu, sudjud, lamundjiato M.Pd, tanggal 20 mei 2011 di kantor kepala sekolah.

- a. Kondisi di dalam masyarakat sekitar SMP Negeri 03 Kota Batu
- b. Hambatan yang ada di setiap bidang pengelolaan
- c. Bidang yang sangat urgen untuk ditingkatkan
- d. Penyimpangan yang dilakukan oleh guru dan staf administrasi dalam melaksanakan tugasnya.’’⁵

4. Kondisi SMP Negeri 03 Kota Batu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Imron S. Pd. Kepala Tata usaha SMP Negeri 03 Kota Batu tentang kondisi SMP Negeri 03 Kota Batu adalah sebagai berikut:

’’Administrasi sekolah pada awal kegiatan pembelajaran bertolak ukur pada administrasi kesiswaan, ketatausahaan, administrasi keuangan, serta penunjang pendidikan lainnya’’.⁶

- a. Administrasi Umum

Administrasi sekolah pada permulaan aktivitas kegiatan pembelajaran bertitik tolak pada administrasi kesiswaan, administrasi ketatausahaan, administrasi keuangan, administrasi pembelajaran dan administrasi penunjang lainnya.

- b. Kurikulum

Adapun kurikulum yang dipakai oleh SMP Negeri 03 Kota Batu adalah KTSP (Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan). Pada permulaan tahun pelajaran, proses belajar mengajar bagi siswa baru diawali dengan kegiatan orientasi siswa baru selama 3 hari. Tujuan orientasi ini adalah

⁵ Dokumentasi SMP Negeri 03 Kota Batu

⁶ Wawancara dengan Bapak imron S. Pd. Kepala Tata usaha SMP Negeri 03 Kota Batu tanggal 21 mei 2011 di kantor TU.

untuk memperkenalkan keadaan sekolah beserta perangkatnya serta lingkungan sekolah kepada siswa baru dengan demikian siswa baru memahami ruang lingkup yang ditempati.

Dengan adanya orientasi membiasakan siswa mengenal gurunya, kakak kelasnya, membiasakan untuk hidup bersih melalui gotong royong membersihkan ruang kelas dan lingkungannya.

c. Kesiswaan

Pelaksanaan Penerimaan Siswa baru tahun 2011/2012 dilaksanakan akhir juni sampai awal juli 2011 dengan proses melalui tes seleksi yang soalnya di koordinir oleh pihak Diknas Kota Batu, setelah melalui perengkingan SMP Negeri 03 Kota Batu baru dapat membuat persyaratan penerimaan siswa baru yang akan diterima ditahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 254 Orang dan sesuai dengan daya tampung yang diberikan oleh pihak Diknas Kota Batu. Pada proses pendaftaran ulang bagi siswa yang diterima berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Setelah kegiatan pendaftaran ulang selesai maka dari 254 orang siswa diadakan pemanggilan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Setelah pendaftaran selesai maka pihak sekolah mengadakan kegiatan orientasi siswa baru selama 3 hari dengan melibatkan guru dan OSIS.⁷

⁷ Dokumentasi SMP Negeri 03 Kota Batu

5. Letak Geografis

SMP negeri 03 Kota Batu terletak di Jl. Raya Beji No. 8 Beji. Hubungan pihak sekolah dengan masyarakat setempat sangat baik, mengingat letak geografis sekolah sangat strategis sebelah timur berbatasan dengan jalan umum, sebelah barat rumah penduduk, sebelah utara jalan umum dan rumah penduduk. Partisipasi masyarakat terhadap SMP Negeri 03 Kota Batu cukup baik terutama wali murid.⁸

6. Denah Lokasi SMP Negeri 03 Kota Batu

Adapun denah Lokasi SMP Negeri 03 Kota Batu terletak di Jl. Raya Beji No. 8 Beji, dan kecamatan junrejo Kota Batu adalah sebagaimana yang terlampir pada lampiran I.⁹

7. Struktur Organisasi SMP Negeri 03 Kota Batu

Adapun struktur organisasi SMP Negeri 03 Kota Batu adalah sebagaimana terlampir pada lampiran II.¹⁰

8. Keadaan Guru dan Siswa SMP Negeri 03 Kota Batu

Pada tahun 2011-2012 SMP Negeri 03 Kota Batu masih membutuhkan penambahan guru dan pegawai, terutama guru dan pegawai PNS yang berasal dari SMP atau SMA, tenaga pengajar dan tenaga administrasi maka kelangsungan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sesuai seperti yang diharapkan.

⁸ Ibid

⁹ Dokumentasi SMP Negeri 03 Kota Batu

¹⁰ Ibid

Dalam meningkatkan kualitas guru, pihak sekolah bekerjasama dengan pihak Diknas akan menyertakan Guru SMP Negeri 03 Kota Batu mengikuti penataran berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Pihak sekolah akan mengikutsertakan guru-guru untuk seleksi guru berprestasi tingkat kota Batu.

Maka seiring dengan semakin pesatnya kemajuan yang telah dicapai dan banyaknya jumlah siswa di SMP Negeri 03 Kota Batu, maka lembaga pendidikan ini terus menambah jumlah tenaga guru dan karyawan yang sesuai dengan kompetensinya dan bidangnya dengan harapan siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang telah menjadi tujuan belajarnya.

Berdasarkan data dokumentasi yang didapat peneliti, tenaga edukatif (guru) dan Tenaga administratif (pegawai) di SMP Negeri 03 Kota Batu Pada tahun 2011-2012 berjumlah 61 orang dengan rincian 50 guru dan 11 tenaga staf administrasi.¹¹

Untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar, tenaga guru sudah cukup untuk semua mata pelajaran, sedangkan untuk tenaga tata usaha SMP Negeri 03 Kota Batu ini masih kekurangan terutama tenaga komputer, karena masih memakai tenaga honor.

Para guru yang ada di SMP Negeri 03 Kota Batu dalam menjalankan tugasnya sudah memiliki latar belakang yang sesuai dengan bidang pendidikannya, yang mana sebagian besar dari mereka telah menempuh pendidikan strata satu (S1) dan banyak juga guru yang

¹¹ Dokumentasi ,SMP Negeri 03 Kota Batu

mendapatkan beasiswa S2, Untuk menghasilkan guru yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang baik, guru-guru yang ada di SMP Negeri 03 Kota Batu masih sering mengikuti seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Diknas Kota Batu yang ada hubungannya dengan masalah kependidikan. Selain keberadaan guru, keberadaan pegawai di sekolah tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam memperlancar proses pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumentasi yang didapat peneliti jumlah Siswa SMP Negeri 03 Kota Batu dalam 4 (empat) tahun terakhir: tahun ajaran 2007-2008 berjumlah 553 orang siswa, tahun ajaran 2008-2009 jumlah siswa bertambah 620 orang siswa, pada tahun ajaran 2009-2010 meningkat menjadi 690 orang siswa, dan pada tahun ajaran 2010-2011 berjumlah 763 Siswa dengan rincian 365 laki-laki dan 398 perempuan. Sedangkan data siswa perkelas rincianya sebagai berikut : kelas VII berjumlah 254 siswa, kelas VIII berjumlah 260 siswa, dan kelas IX berjumlah 249 siswa. Seperti yang terlampir pada tabel I dan II.¹²

¹² Dokumentasi, SMP Negeri 03 Kota Batu

Tabel 01: Data Jumlah Siswa Kelas VII Smp Negeri 03 Kota Batu¹³

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
VII.1	18	20	38
VII. 2	17	20	37
VII. 3	15	21	36
VII. c	15	20	35
VII. 5	17	21	38
VII. 6	16	19	35
VII. 7	17	18	35
Juml. Laki-laki	115		
Juml. Perempuan		139	
TOTAL			254

Tabel 02: Data jumlah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 03 Kota Batu.¹⁴

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
VIII. 1	17	18	35
VIII. 2	16	17	33
VIII. 3	16	17	33
VIII. c	17	18	35
VIII. 5	15	18	33
VIII. 6	14	15	29
VIII. 7	15	16	31
VIII. 8	15	16	31
Juml. Laki-laki	125		
Juml. Perempuan		135	
TOTAL			260

¹³ Ibid¹⁴ Dokumentasi SMP Negeri 03 Kota Batu.

Tabel 03: Data Jumlah Siswa Kelas IX SMP Negeri 03 Kota Batu¹⁵

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IX. 1	17	18	35
IX. 2	19	18	37
IX. 3	18	17	35
IX. c	18	18	36
IX. 5	18	17	35
IX. 6	17	18	35
IX. 7	18	18	36
Juml. Laki-laki	125		
Juml. Perempuan		124	
TOTAL			249

9. Sarana dan prasarana SMP Negeri 03 Kota Batu

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 03 Kota Batu cukup lengkap dengan ruang belajar yang tersedia 22 ruang, 1 buah ruang Laboratorium, 1 buah perpustakaan, Ruang musholla, kantor guru, kantor kepala sekolah, kantor tata usaha, ruang BK, UKS, kesenian, penjaga Sekolah, lapangan Basket, Volley, badminton, pos jaga, garasi motor dan sepeda, gudang, wc siswa, wc guru, wc kepala sekolah, telepon, listrik, taman di depan kelas.¹⁶

¹⁵ Dokumentasi SMP Negeri 03 Kota Batu

¹⁶ Dokumentasi. SMP Negeri Kota Batu.

B. Keadaan Komite Sekolah

1. Komite Sekolah

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tutiek Adiasih, SP.d. selaku Anggota Komite Sekolah di SMP Negeri 03 Kota Batu awal mula terbentuknya Komite Sekolah di SMP Negeri 03 Kota Batu adalah sebagai berikut:

“awal terbentuknya komite sekolah di SMP Negeri 03 Kota Batu, pada awal tahun ajaran 2007/2008, yang mana Komite Sekolah ini awal mulanya adalah (BP3) atau yang biasa dikenal dengan istilah perkumpulan dari orang tua murid (wali Murid) jadi komite sekolah adalah kelanjutan dari BP3, yang sekarang memasuki tahun kedua tahun ajaran 2008/2009.¹⁷

Komite Sekolah di SMP Negeri 03 Kota Batu ini terbentuk pada awal tahun ajaran 2007/2008 yang mana Terbentuknya Komite Sekolah ini adalah kelanjutan dari BP3 yang kemudian berubah nama menjadi Komite Sekolah yang diharapkan nantinya sebagai wujud peran-serta aktif orang tua siswa dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Di bentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat. Sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya,

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Tutiek Adiasih, S.Pd. Anggota Komite Sekolah dan Guru SMP Negeri 03 Kota Batu. Tgl 21 Mei 2011 di Kantor SMP Negeri 03 Kota Batu.

demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tutiek S. Pd, Anggota Komite Sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu tentang data kepengurusan Komite Sekolah adalah sebagai berikut, seperti yang terlampir di Tabel 1V:

“Kepengurusan Komite sekolah di SMP Negeri 03 Kota Batu setiap tahunnya berubah sesuai masa jabatannya. Dan kepengurusan komite sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu ini sekarang memasuki tahun ke empat dari kepengurusan yaitu tahun ajaran 2008/2009 terbentuklah Dewan Komite Sekolah yang beranggotakan 10 orang yang berasal dari berbagai unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat yaitu; Drs.H. Sujud Lamudjianto,M.Pd. sebagai Kepala Sekolah, Drs.Didik Subagio M.Si. Sebagai Ketua Komite, Mashudi sebagai Wakil Ketua, Mei Asih, S.Pd sebagai sekertaris satu, Hj. Siti Aisyah sebagai sekertaris dua, Dra.E.C. Ratih Puspita Dewi, M.Sc sebagai bendahara, Drs. Bambang Chusaini sebagai seksi Pembelajaran, A.B. Fadjar Ain, S. Pd. sebagai seksi Kesiswaan, Tutiek Adiasih, S.Pd sebagai seksi Hubungan Masyarakat, Endang Nuraini sebagai seksi Sarana Prasarana.”¹⁹

¹⁸ Depdiknas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Panduan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Jakarta. 2003. hlm.20.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Tutiek Adiasih, S.Pd. Anggota Komite Sekolah dan Guru SMP Negeri 03 Kota Batu. Tgl 21 Mei 2011 di Kantor SMP Negeri 03 Kota Batu.

**Data Kepengurusan Komite Sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu Tahun
Pelajaran 2010/ 2011²⁰.**

No	Nama	Jabatan
1	Drs.H. Sudjud Lamudjianto, M. Pd.	Kepala Sekolah
2	Drs. Didik Subagio, M.Si	Ketua Komite
3	Mashudi	Wakil Ketua
4	Mei Asih	Sekretaris 1
5	Hj. Siti Aisyah	Sekretaris 11
6	Dra. E.C. Ratih Puspita Dewi, M.Sc.	Bendahara
7	Drs. Bambang Chusaini	Seksi Pembelajaran
8	A.B. Fadjar Ain, S. Pd.	Seksi Kesiswaan
9	Tutiek Adiasih, S.Pd.	Seksi Hubungan Masyarakat
10	Endang Nuraini	Seksi Sarana Prasarana

2. Fungsi dan Tujuan Komite Sekolah

Mengenai fungsi dan Tujuan dari Komite Sekolah di SMP Negeri 03 Kota Batu ini adalah untuk memberikan masukan kepada pihak Sekolah terhadap pelaksanaan program Sekolah yang relevan serta dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RABPS), seperti yang di sampaikan Bapak Kepala Sekolah saat di wawancara sebagai berikut:

“Fungsi dan Tujuan dari Komite Sekolah di SMP Negeri 03 Kota Batu adalah untuk memberikan masukan, dan pertimbangan terhadap program-

²⁰ Dokumentasi SMP Negeri 03 Kota Batu

program pendidikan yang akan dilaksanakan oleh sekolah serta Komite Sekolah bersama-sama dengan masyarakat, wali Murid dan Dewan Guru ikut menyusun RAPBS (Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah) dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan”.²¹

Selain fungsi komite sekolah adalah untuk memberikan masukan, dan pertimbangan terhadap program sekolah, komite sekolah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan Program pendidikan;
 - b. Rencana anggaran Pendidikan dan belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. Kriteria kinerja satuan Pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga kependidikan.
 - e. Kriteria Fasilitas pendidikan;
 - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

²¹ Wawancara dengan Bapak kepala Sekolah SMPN 03 Kota Batu, sudjud, lamudjiato M.Pd, tanggal 20 mei 2011 di kantor kepala sekolah.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan .
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Salah satu model pengelolaan pendidikan yang kini digagas oleh departemen Pendidikan nasional adalah apa yang disebut dengan MBS (Manajemen Berbasis sekolah). MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalanya pendidikan di daerah masing- masing.²² Yang mana MBS ini memberikan otonomi yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada sekoalh dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Di samping itu MBS juga bertujuan untuk mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua stake holder pendidikan di sekolah. Maka dari itu MBS memberikan kewenangan yang luas kepada SMP Negeri 03 Kota Batu untuk mengontrol peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu sendiri. Dalam kaitan persoalan diatas, munculnya konsep MBS dapat dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan otonomi (kemandirian) dan profesionalisasi setiap satuan pendidikan (sekolah). Keberhasilan MBS tentu dapat ditentukan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat,

²² Depdiknas, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Acuan Operasional dan indicator kerja komite sekolah, Jakarta; 2005. hlm,8.

dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas, keberadaan Komite sekolah di tingkat satuan pendidikan/sekolah sangat mendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Anggota Komite Sekolah tentang tujuan di bentuknya Komite Sekolah agar terciptanya transparansi, dan akuntabilitas di satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Sekolah, berikut hasil wawancaranya;

“Tujuan di bentuknya Komite Sekolah adalah untuk transparansi antara pihak Sekolah dengan wali murid, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Sekolah”²³

Sedangkan tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu.

²³ Wawancara dengan Ibu Tutiek Adiasih, S.Pd. Anggota Komite Sekolah dan Guru SMP Negeri 03 Kota Batu. Tgl 21 mei 2011 di Kantor SMP Negeri 03 Kota Batu.

3. Struktur Organisasi Komite Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tutiek S. Pd, selaku Anggota Komite Sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu merangkap sebagai guru SMP Negeri Kota Batu tentang struktur Organisasi Komite Sekolah keanggotaannya berasal dari unsur-unsur masyarakat yaitu dari perwakilan orang tua, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan serta perwakilan dari dunia industri/usaha, berikut petikan hasil wawancaranya:

“Bahwasanya keanggotaan Komite Sekolah berasal dari unsure masyarakat dapat berasal dari perwakilan dari dunia pendidikan guru, orang tua/wali, dan dunia usaha lainnya.”²⁴

Sementara itu, anggota komite sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, tokoh masyarakat, anggota masyarakat yang mempunyai perhatian lebih terhadap dunia pendidikan, pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, serta anggota komite sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan lembaga penyelenggara pendidikan.

Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh). Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan di dalam AD/ART.²⁵

Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara.

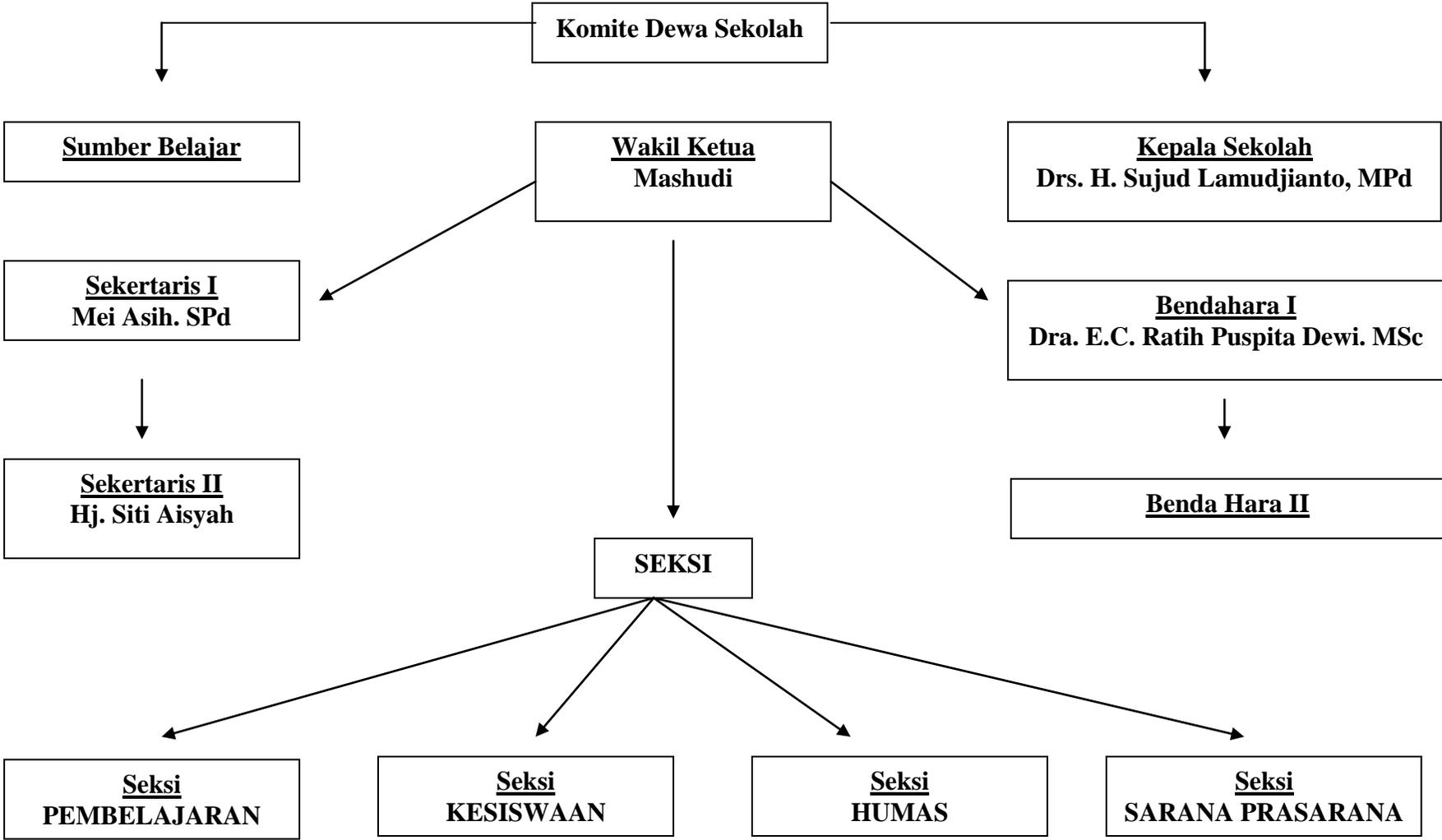
²⁴ Ibid

²⁵ Opcit, hlm. 17.

Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite sekolah bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.

Berdasarkan dokumentasi SMP Negeri 03 Kota Batu, Pengurus Komite sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu adalah sebagai berikut

**STRUKTUR ORGANISASI KOMITE/DEWAN SEKOLAH
SMP NEGERI 03 KOTA BATU**



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tutiek Adiasih S. Pd, tentang pembagian tugas dan tanggung jawab kepengurusan Komite Sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu Tahun pelajaran 2010-2011 adalah sebagai berikut:

“Anggota kepengurusan Komite Sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu ini berjumlah 10 orang, yaitu terdiri dari Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, bidang pembelajaran, bidang kesiswaan, bidang hubungan masyarakat, bidang sarana prasarana, dengan jabatan dan tugasnya masing-masing”.²⁶

a) Pembina, tugasnya yaitu:

- 1) Mengawasi berjalannya Komite Sekolah
- 2) Memberi pengarahan dan pengorganisasian.

b) Ketua, tugasnya yaitu:

- 1) Menyusun perencanaan
- 2) Membuat program kegiatan dan pelaksanaan program.

c) Sekretaris, tugasnya yaitu:

- 1) Membuat laporan kegiatan
- 2) Membuat jadwal pembagian tugas.

d) Bendahara, tugasnya yaitu:

- 1) Bersama-sama dengan bidang hubungan masyarakat menjalin
- 2) Kerjasama dengan dunia usaha dalam penggalangan dana bagi
- 3) Anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa
- 4) Menyusun administrasi keuangan Komite Sekolah

²⁶ Wawancara dengan Ibu Tutiek Adiasih, S.Pd. Anggota Komite Sekolah dan Guru SMP Negeri 03 Kota Batu. Tgl 21 mei 2011 di Kantor SMP Negeri 03 Kota Batu.

e) Bidang Pembelajaran, tugasnya yaitu:

- 1) Ikut membina dan mengawasi pelaksanaan pendidikan agar terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang efektif
- 2) nanya transparansi dan akuntabilitasi di lingkungan Sekolah
- 3) Menyusun laporan kegiatan Sekolah secara berkala/akhir tahun Pelajaran

f) Bidang Kesiswaan, tugasnya yaitu:

- 1) Bersama guru ikut menyeleksi calon siswa untuk di usulkan mendapatkan beasiswa
- 2) Mengawasi perkembangan dan keadaan siswa

g) Bidang Hubungan Masyarakat, tugasnya yaitu:

- 1) Mengatur penyelenggaraan hubungan sekolah dengan orang tua Siswa
- 2) Membina pengembangan hubungan antara sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga sosial lainnya.

h) Bidang Sarana dan Prasarana,tugasnya yaitu:

- 1) Mengkoordinir penambahan peralatan kantor, sarana penunjang Belajar-mengajar
- 2) Bekerjasama dengan wali murid mengadakan rehab/perbaikan Gedung Sekolah dan perpustakaan.

4. Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu.

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan

efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan di pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Di samping itu komite sekolah merupakan suatu badan non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh stake-holder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsure yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Mengenai peranan Komite Sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Tutiek Adiasih S. Pd, Dan hasilnya sebagai berikut:

”Peran komite sekolah adalah sebagai Pemberi masukan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pertimbangan dalam penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran dan Pendapatan dan belanja sekolah, Program Sekolah termasuk kurikulum didalamnya, yaitu memberi pertimbangan dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan hal-hal yang menyangkut peningkatan mutu pendidikan di Sekolah.serta sebagai pendukung berwujud financial, pemikiran,tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan²⁷

Mutu layanan pendidikan adalah pencapaian standar yang dipersepsi oleh pengguna layanan yang menyamai atau bahkan melebihi standar layanan pendidikan yang berlaku. Pendidikan adalah upaya sadar untuk memfasilitasi perkembangan dan peningkatan potensi peserta didik. Inti dari pendidikan adalah kegiatan pembelajaran. Pada jenis satuan pendidikan formal, seperti di sekolah menengah dan bentuk persekolahan lainnya pada jenjang yang di atasnya. Inti pendidikan berupa pembelajaran

²⁷ Wawancara dengan Ibu Tutiek Adiasih, S.Pd. Anggota Komite Sekolah dan Guru SMP Negeri 03 Kota Batu. Tgl 21 mei 2011 di Kantor SMP Negeri 03 Kota Batu.

biasa disebut dengan proses pembelajaran. Dengan demikian layanan pendidikan adalah berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan terjadinya kondisi proses pembelajaran yang baik atau bermutu termasuk di dalamnya kualitas sumber daya manusia. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, komite sekolah harus melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan operasional yang kreatif dan inovatif.

Peran Komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan sekali di dalam penyusunan program-program sekolah yang relevan dan hasil belajar siswa, karena posisi Komite Sekolah berada di tengah-tengah antara pihak Sekolah, terutama (Guru) dan masyarakat (Wali murid) dalam memberikan masukan atas keberhasilan dan ketidakberhasilan siswa serta bersama-sama mencari solusinya, Berikut hasil wawancara Penulis dengan Ibu Tutiek Adiasih S.Pd.:

“Peran komite disini diperlukan untuk bersama-sama menyusun RAPBS, baik program jangka-panjang dan jangka pendek serta agar adanya transparansi antara pihak sekolah dengan masyarakat (orang tua/wali) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.”²⁸

Senada dengan apa yang di ungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah

Drs. H. Sudjud Lamudjianto, M. Pd:

“salah satu bentuk peran serta komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan guru yaitu dengan selalu dilibatkan secara langsung komite sekolah dalam rapat rutin dan penyusunan program-program sekolah, beliau juga mengatakan bahwasanya hubungan kerja sama antara komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan

²⁸ Wawancara dengan Ibu Tutiek Adiasih, S.Pd. Anggota Komite Sekolah dan Guru SMP Negeri 03 Kota Batu. Tgl 21 Mei 2011 di Kantor SMP Negeri 03 Kota Batu.

pendidikan dengan guru di SMP Negeri 03 Kota Batu ini sangat terjalin dengan baik dan transparan.²⁹

Peran komite sekolah yang ada di Sekolah Menengah pertama (SMP) Negeri 03 Kota Batu adalah:

Pemberi pertimbangan (*advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumberdaya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.
2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberi pertimbangan atau masukan kepada sekolah
3. memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP)
4. memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran
5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM)
6. memberikan masukan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi-misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pendidikan di sekolah.

²⁹ Wawancara dengan Bapak kepala Sekolah SMPN 03 Kota Batu, sudjud, lamundjiato M.Pd, tanggal 20 mei 2011 di kantor kepala sekolah.

7. memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.³⁰

Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Pengontrol (*controlling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Dari pernyataan di atas bahwasanya peran Komite Sekolah dalam meningkatkan kegiatan belajar-mengajar guru di SMP Negeri 03 Kota Batu adalah sebagai pemberi Pertimbangan (*Advisory agency*), Pendukung (*Supporting*), Pengontrol (*Controlling*), dan Mediator.

Dari kondisi Komite sekolah yang ada di SMP Negeri 03 Kota Batu seperti yang di bahas diatas bahwasanya peran komite sekolah dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar sangat berperan sekali yaitu dalam membantu menyusun program-program pendidikan dan dalam pengembangan kurikulum serta menyusun RAPBS bersama-sama pihak sekolah dan dewan guru. dengan adanya peranan komite sekolah dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 03 Kota Batu ini diharapkan sekolah dapat mempertanggungjawabkan hasil-hasil pendidikan yang dicapai kepada stake holder pendidikan atau semua pihak

³⁰ Dokumentasi SMP Negeri 03 Kota Batu

secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Komite sekolah juga dapat melaksanakan perannya sebagai patner sekolah (termasuk di dalamnya dewan guru, dan staf administratif, dan kepala sekolah) dalam meningkatkan dan mengadakan sumber-sumber daya pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan siswa untuk belajar seefisien mungkin sehingga pembelajaran semakin efektif dan bermutu.

Dari kondisi Komite Sekolah yang ada di SMP Negeri 03 Kota Batu seperti itu, maka Komite Sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu telah melaksanakan peran sebagai penunjang pelaksanaan peran sebagai penunjang pelaksanaan proses pembelajaran dan sejalan dengan kondisi permasalahan lingkungan masing-masing Sekolah.

Komite Sekolah dapat melaksanakan perannya sebagai patner dari kepala Sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan siswa untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif serta dapat meningkatkan pelayanan mutu pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu.

5. Bentuk Kerjasama antara Komite Sekolah dengan Guru dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu.

Dukungan pemikiran yang diberikan oleh Komite Sekolah diwujudkan dengan memberi pertimbangan kepada Sekolah dalam rangka

menentukan program-program kerja Sekolah jangka panjang dan jangka pendek, besarnya SPP, merancang RAPBS, kegiatan pembelajaran Guru, dan memecahkan masalah yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Kerjasama yang erat antara Komite Sekolah dengan masyarakat sekolah, terutama guru sangat diperlukan sekali dalam hal ini. Dikarenakan untuk meningkatkan kegiatan belajar-mengajar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kerjasama antara Komite Sekolah dengan guru yaitu dalam hal penentuan hasil belajar siswa serta bersama-sama mencari solusi dalam keberhasilan siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu mengenai bentuk kerjasama antara Komite Sekolah dengan Guru SMP Negeri 03 Kota Batu adalah sebagai berikut:

“Kerjasama antara Komite Sekolah dan Guru yang ada di Sekolah ini terjalin dengan sangat baik sekali. Salah satunya yaitu dengan selalu melibatkan Komite Sekolah dalam pembentuka dan pertimbangan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), serta dalam pengembangan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), Komite Sekolah bersama-sama guru selalu memberikan masukan dan pertimbangan terhadap hasil evaluasi siswa, keberhasilan siswa dan mencari solusi ketidakberhasilan siswa”.³¹

³¹ Wawancara dengan Bapak kepala Sekolah SMPN 03 Kota Batu, sudjud, lamundjiato M.Pd, tanggal 20 mei 2011 di kantor kepala sekolah.

Sebagai mitra kerja Sekolah maka Komite Sekolah bersama-sama guru berkewajiban membantu kelancaran proses belajar-mengajar di Sekolah termasuk dalam memberikan masukan, saran, dan kritikan kepada pihak Sekolah dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, bahkan bila diperlukan Komite Sekolah dapat menghimpun dana di Masyarakat untuk keperluan dan kelancaran proses belajar-mengajar.

Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran adalah secara langsung Guru (kemampuan, kompetensi dan komitmen), bakat, dan motivasi peserta didik. Sedangkan secara tidak langsung adalah sarana dan prasarana, lingkungan dan hal-hal yang mendorong untuk terjadinya kondisi pembelajaran yang efektif dan bermutu maka dari itu peran Komite Sekolah sangat diharapkan.

Peran komite sekolah sebagai pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat berupa dukungan financial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan.

Peran pengawasan yang dijalankan oleh komite sekolah merupakan jenis pengawasan masyarakat. Fungsi pengawasan yang dilakukan meliputi kontrol terhadap pengambilan dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah yang dilihat dari mutu

output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas/mutu pendidikan.

Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Maka dari itu kerjasama yang baik antara Komite Sekolah dengan pihak Sekolah khususnya guru sangat diperlukan sekali.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti berusaha untuk menjelaskan dan menjawab apa yang sudah peneliti kemukakan dengan beberapa data yang sudah ditemukan pula dari hasil observasi, interview, maupun dokumentasi. Berangkat dari sini peneliti akan mencoba mendeskripsikan data-data yang telah peneliti temukan berdasarkan logika dan diperkuat dengan teori yang sudah ada yang kemudian di harapkan bisa menemukan sesuatu yang baru .

Sesuai dengan teknik analisa yang sudah peneliti kemukakan adapun pembahasannya juga berdasarkan rumusan masalah yang sudah peneliti kemukakan:

A. Peran komite Sekolah Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Di SMP Negeri 03 Kota Batu

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO. 044/U/2002 yang merupakan acuan utama dalam pembentukan komite sekolah maka peran komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan adalah memiliki arti bahwasanya komite sekolah adalah mitra kerja sekolah, kepala sekolah dan dewan guru, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, supaya

masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan itu maka diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang ada, maka peran komite sekolah di SMP Negeri 03 Kota Batu ini adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pendataan kondisi social ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan dimasyarakat sekitar sekolah
2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah
3. memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
4. memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan koalitas pendidikan.
5. memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS serta peran komite sekolah disini Sangat dibutuhkan dalam membentuk RAPBS
6. memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program sekolah program jangka pendek maupun jangka panjang serta kegiatan pendidikan di sekolah.
7. memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).

2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Peran komite sekolah sebagai supporting agency atau pendukung dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu adalah, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Dengan mengadakan pertemuan secara berkala dan pertemuan rutin dengan stakeholders di lingkungan sekolah.
2. mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/ industri memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
3. memotivasi masyarakat kalangan menengah keatas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
4. mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan dalam penyediaan sarana/prasarana pendidikan. Dan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah.

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Peran pengawasan yang dijalankan oleh komite sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu adalah minimal dengan memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan. Yaitu dengan meminta penjelasan kepada sekolah (dewan Guru khususnya) tentang hasil belajar siswa di sekolahnya. Serta mengadakan komunikasi yang interen dengan guru dan bekerja sama dengan pihak sekolah kepala sekolah, dewan guru dalam mencari penyebab ketidak berhasilan siswa dan mencari solusinya. Serta memperkuat hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Hasil pengawasan komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu ini dengan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan dari masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Fungsi pengawasan disini juga dengan memberiakan persetujuan terhadap besarnya anggaran pendidikan sekolah baik itu guru dan civitas akademika lainnya.

4. Mediator antara Pemerintah (Eksekutif) dengan Masyarakat di Satuan Pendidikan:

Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara sekolah, orang tua, dan masyarakat memberikan aspirasi yang akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan,

dan kebutuhan orang tua siswa dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh masyarakat SMP Negeri 03 Kota Batu, sebagai masukan bagi koreksi kearah perbaikan serta membantu dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat untuk menjadikan SMP Negeri 03 Kota Batu menjadi lebih berkualitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Komite Sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat. Bagi Komite sekolah peran yang dijalankan sebagai mediator di SMP Negeri 03 Kota Batu dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar guru adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada dewan guru dengan orang tua siswa bagi pelaksanaannya pendidikan di sekolah.

Komite sekolah sebagai mediator adalah dengan melakukan kerjasama baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dengan membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholders pendidikan disekitar sekolah. Mengadakan peninjauan tentang kemungkinan untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga lain diluar sekolah untuk memajukan mutu penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu.

Dari kondisi Komite Sekolah yang ada di SMP negeri 03 Kota Batu seperti itu, komite sekolah SMP Negeri 03 Kota Batu akan dapat melaksanakan peran dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan SMP Negeri 03 Kota Batu.

Komite Sekolah juga dapat melaksanakan perannya sebagai patner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan siswa untuk belajar sebanyak mungkin sehingga proses kegiatan belajar mengajar menjadi semakin efektif.

Adanya sinergi antara komite sekolah dengan sekolah menyebabkan lahirnya tagung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan dewan guru sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan SMP negeri 03 Kota Batu.

Maka dari sinilah masyarakat dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan kualitas pendidikan melalui peran serta komite sekolah dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar guru di SMP Negeri 03 Kota Batu dengan menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat dalam bentuk; menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, ide kreatif dari stake holder pendidikan di sekitar sekolah;

dan menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di sekitar sekolah.

B. Bentuk Kerja Sama antara Komite Sekolah dengan Guru dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu.

Salah satu bentuk kerja sama antara komite Sekolah dan guru dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang ada di SMP Negeri 03 Kota Batu ini terbukti dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas guru di dalam peningkatan mutu pendidikan didukung oleh kemampuan SDM yang memadai.

Selain itu juga hubungan kerja sama komite sekolah dengan guru dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 03 Kota Batu ini dengan selalu dilibatkannya Komite sekolah ke dalam penyusunan program-program sekolah baik itu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar maupun dalam memberikan kepada sekolah terutama guru-guru dalam rangka pengembangan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Komite`sekolah juga bekerjasama dengan Guru dalam penyusunan RAPBS dengan memberikan masukan, dan ide-ide yang cemerlang.

Komite sekolah juga selalu diikutsertakan kedalam rapat rutin sekolah baik itu awal semester maupun akhir semester serta berbagai kegiatan yang diadakan oleh sekolah, dan memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah (guru), selain itu juga komite sekolah meminta laporan pertanggung jawaban kepada guru

tentang hasil belajar siswa dan penyebab ketidak berhasilan belajar siswa, dan mencari solusi agar masalah tersebut dapat teratasi dengan baik.

Bentuk kerjasama yang lain antara komite sekolah dengan guru dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu ini yaitu terbukti dengan peran komite sekolah dalam memberi pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM) karena hal-hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran adalah secara langsung Guru (kemampuan/kompetensi, dan komitmen), bakat, dan motivasi peserta didik sedangkan yang tidak langsung adalah sarana dan prasarana, dana, lingkungan dan hal-hak yang mendorong untuk terjadinya kondisi pembelajaran yang efektif dan bermutu.

Kerjasama Komite Sekolah dengan guru Yang ada di SMP Negeri 03 Kota Batu yaitu dengan memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam memberantas penyebarluasan narkoba di sekolah, dari pada itu komite sekolah juga memberikan dukungan kepada guru dalam pelaksanaan kegiatan extra kurikuler di sekolah.

Selain itu juga Komite Sekolah bekerjasama dengan guru mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan dalam peningkatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah misalnya penambahan kursi dan meja, serta pembuatan mushola, wc, dan lapangan olahraga di SMP Negeri 03 Kota Batu.

Selain peran yang telah disebutkan diatas, peran nyata yang dilaksanakan komite sekolah adalah sebagai mitra atau patner bagi pemerintah daerah atau sekolah. Badan ini memiliki peran sebatas memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak sekolah, serta memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

Inilah bentuk kerja sama antara komite sekolah dengan guru dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu ini yang mengutamakan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. maka terjalinya kerjasama yang baik antara Komite Sekolah dan guru dengan mempunya Komite Sekolah mengakses dan mengoptimalisasi berbagai sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian rencana program pendidikan, serta terciptanya sinergi antar kepentingan guru,masyarakat, sekolah dan komite sekolah untuk mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan dan pendidikan untuk semua.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara Pemerintah (*eksekutif*) dengan Masyarakat di satuan pendidikan.

2. Bentuk Kerjasama Antara Komite Sekolah Dan Guru dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu.

Bentuk kerjasama antara komite sekolah dengan guru dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP 03 Kota Batu yaitu dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara komite sekolah dan guru adalah dengan selalu dilibatkannya komite sekolah dalam memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), memberikan pertimbangan kepada sekolah dan guru dalam peningkatan mutu pendidikan, memberikan masukan kepada sekolah dan khususnya guru untuk menyelenggaraan pembelajaran yang efektif (PAKEM), dan selalu dilibatkannya komite sekolah kedalam rapat rutin dan bersama-sama dengan guru mengevaluasi hasil belajar siswa dan mencari faktor penyebab ketidakberhasilan belajar siswa serta mencari solusinya, Komite Sekolah bersama-sama guru dan sekoalh menyusun visi, misi, tujuan, dan kegiatan belajar-mengajar guru, serta dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS), maka dari itu semakin baik kerjasama komite sekolah dengan guru dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan maka semakin baik pula kualitas mutu pendidikan yang diperoleh SMP Negeri 03 Kota Batu.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar peran komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 03 Kota Batu lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal ada beberapa temuan yang peneliti peroleh dan dapat dijadikan bahan masukan bagi

penyempurnaan peran Komite Sekolah, serta berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Pihak Sekolah hendaknya dapat membuka diri dengan saran dan kritikan dari Komite Sekolah yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat selalu ditingkatkan dari hari kehari
- 2) Pihak Sekolah hendaklah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan agar tidak mengalami banyak kendala di dalam kegiatan belajar mengajar.
- 3) Kepada Pihak Komite Sekolah hendaknya dalam melakukan tugas benar-benar dapat secara profesional dan proporsional, sehingga apa yang menjadi tugas dan wewenangnya tidak menyimpang dari yang seharusnya.
- 4) Kepada Pihak Pemerintah hendaknya dapat lebih mensosialisasikan keberadaan komite sekolah ini karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti secara utuh mengenai Komite Sekolah ini.
- 5) Kepada Pihak Masyarakat terutama wali murid diharapkan dapat memanfaatkan sebaik mungkin keberadaan Komite Sekolah ini untuk kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan peserta didik.
- 6) Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa. 2007. *Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabung Talun Blitar*. Skripsi. Malang: UIN Malang.

Abdurrahman, Mulyono.1999. *Pendidikan Bagi anak Berkesulitan Belajar*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi.1993. *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka cipta.

Adi Gunawan, *kamus ilmiah Populer*. (Surabaya; Penerbit Kartika).

Depdikbud. 2002. *petunjuk Pelaksanaan dan Pembentukan komite Sekolah*, Jakarta : Direktorat Pendidikan Menengah pertama.

Slameto,Drs. 1991. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Zuhairini dan Abdul Ghafir. 2004. *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Malang : UM Press

Undang-undang RI No.20 Th. 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003).

Undang-undang Dasar 1945...

Nata abudin, 2001. *Paradigma Pendidikan Islam. Kapita Selekta pendidikan Islam* Jakarta Grasindo.

Nata Abudin, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid* Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2001.

Adi Gunawan, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya; Penerbit Kartika).

Abu Ahmadi, *Pengantar Metodik Dedakti Untuk Guru dan Calon Guru*, Bandung: CV. Armico, 1989.

Amir Daiem Indrakusuma, *Ilmu Pendidikan Sebuah Tinjauan Teoritis Filosofis*, Surabaya: Usaha Nasional, 1973

Baharudin, Esa Nur Wahyuni. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Ar-Ruzz Media Grup, 2007.

Crow and Crow Saduran Bebas, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jogjakarta: Rake Sarasin, 1988.

Cece Wijaya, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Editor Enggas Suparman.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art(J-ART), 2004.

Departemen Pendidikan Nasional. *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*.(Jakarta: Dirjen Dikdasmen,2004

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art(J-ART), 2004.

Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* , Jakarta: Raja Grafindo. 2001.

Moeloeng, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Grafindo Persada,2005.

Muhaimin, Sutiah, Nur Ali, *Strategi Belajar mengajar*. CV. Citra Media, 1996.

Me E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rineka Cipta, 2002.

Menteri Pendidikan Nasional. *Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006)..

M. Sobri Sutikno, *Menggagas Pembelajaran Efektif dan bermakna*, NTP Pres, mataram, 2007

.

Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Surat Keputusan (SK) Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/409/2003. “Tentang Pembentukan Komite Madrasah Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam”.

Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah*, Tangerang: Agromedia Pustaka, 2006.

Suryasubroto, *Proses Belajar mengajar di Sekolah*, Rineka Cipta, 1997.

Rohmad Ali, *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta :PT. Bima Ilmu, 2004.

Suti'ah, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2003.

Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, 2006..

Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bayu Inda Grafika, 2001.

DOKUMENTASI



foto: salah satu contoh Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SMPN 03 Kota Batu



Foto: Kegiatan para guru di kantor



Foto: Salah satu Kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani

MOTTO

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....."* (Al-Maidah Ayat 2)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN NOTA DINAS	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Sitematika Pembahasan	13
H. Penegasan Istilah	14
BAB II TINJAUAN TEORI	16
A. Peranan Komite Sekolah	16
1. Pengertian Komite Sekolah	16
2. Kedudukan dan sifat Komite Sekolah	18
3. Tujuan Komite Sekolah	20
4. Fungsi dan Tugas Komite Sekolah	22
5. Pembentukan Komite Sekolah	25
6. Landasan Terbentuknya Komite Sekolah	27
7. Struktur organisasi Komite Sekolah	30

8. Peran Komite Sekolah.....	34
B. Kegiatan Belajar Mengajar	38
1. Pengertian Belajar Mengajar.....	38
2. Proses Belajar Mengajar yang Efektif dan Aktif	44
C. Pengertian Guru	47
1. Sifat-sifat Guru.....	48
2. Ciri-ciri Guru.....	52
3. Tugas Guru.....	55
4. Syarat-syarat Guru	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	66
B. Kehadiran Peneliti.....	68
C. Lokasi Penelitian.....	69
D. Data dan Sumber data	69
E. Metode pengumpulan data.....	71
F. Analisis data.....	73
G. Pengecekan Keabsahan Data	74
H. Tahapan Penelitian.....	75
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	78
A. Latar Belakang Obyek Penelitian	78
1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 03 Kota Batu	78
2. Visi dan Misi SMP Negeri 203 Kota Batu.....	79
3. Tujuan SMP Negeri 03 Kota Batu	79
4. Kondisi SMP Negeri 03 Kota Batu.....	81
5. Letak Geografis SMP negeri 03 Kota Batu	83
6. Denah Lokasi SMP Negeri 03 Kota Batu	83
7. Stuktur Organisasi SMP Negeri 03 Kota Batu	83
8. Keadaan Guru dan Siswa SMP Negeri 03 Kota Batu.....	83
9. Sarana dan prasarana SMP Negeri 03 Kota Batu	87
B. Keadaan Komite Sekolah.....	88

1. Komite Sekolah.....	88
2. Fungsi dan Tujuan Komite Sekolah.....	90
3. Struktur Organisasi Komite Sekolah	94
4. Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kegiatan Belajar Mengajar Guru di SMP Negeri 03 Kota Batu.....	81
5. Bentuk Kerjasama antara Komite Sekolah dengan Guru SMP Negeri 03 Kota Batu	103
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	106
A. Peranan komite sekolah dalam meningkatkan kegiatan belajar Guru di SMP Negeri 03 Kota Batu	106
B. Bentuk Kerja sama antara komite sekolah dengan guru yang ada di SMP Negeri 03 Kota Batu.....	112
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran-saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilakhirabbil'alamiin

*Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
ku persembahkan skripsi ini teruntuk;*

Ayah dan Ibunda tercinta, Sulthonaan dan Sholikhuul Huda , dengan segenap ketulusan kasih sayang yang telah mengasuhku dan memeberikan pelajaran hidup yang sangat berharga selama ini.serta berjuta-juta utaian doa yang dipersembahkan kepada ananda. ananda haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua pengorbanan ayahanda dan ibunda berikan.

adikku tersayang M. Hikam Falakhuiddin atas kasih dan sayangnya. yang terkasih Revi Trimadona, atas semua ketulusan kasih dan sayang yang selalu memberikan bantuan,motivasi serta doanya. keluarga besarku di gresik dan palembang (Dra. Hj. Zuraidah M. si dan Bapak Ir. H. M. zaironi dan keluarga)terima kasih atas dukungan kalian, sehingga aku bisa terus berpacu dan termotivasi untuk mewujudkan cita-citaku

Bapak Dr. H. farid Hasyim, M. Ag. yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketikhlasan sehingga dapat terselesaikan rangkaian-rangkaian skripsi ini.

Dosen-dosenku tercinta Bpk, H.M.Padil. M. pdi, Fahim Tharaba, M. Pdi, Yakın M.Pdi. Bani, Abdul azis M. Pdi atas segenap bantuan semangat dan doanya.

Sahabat-sahabatku tersayang anak-anak kumat (kumpulan alumni tebuireng) kang miad, dede,juwet,samohong,kuntet , faisal, junaida, mba nihla, fahri, frenda, dedy kumolontang (bantuan editingnya) terimakasih atas semua bantuan dan doa yang kalian persembahkan selama ini tetap semangat.

dan teman-temanku satu angkatan yang tak dapat aku sebutkan satu persatu namanya,bersama kalian aku tertawa untuk menghilangkan rasa penat yang ada

Syukuron katsir atas motivasi yang kalian berikan ke aku demi tercapainya cita dan cintaku. mudahan-mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan balasan yang setimpal aminnn.....